

EFISIENSI ANGGARAN UNTUK PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN

Andi Amran Sulaiman, dkk.

PERTANIAN PRESS

2025

EFISIENSI ANGGARAN UNTUK PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN

©Andi Amran Sulaiman, dkk.

Penulis	: Andi Amran Sulaiman I Ketut Kariyasa Galih Prabowo Ahmad Muhtarom Zia Ulhaq
Penelaah substansi	: Prof. Dr. Ir. Mat Syukur, M.S. Hari Edi Soekirno, S.E., M.A.
Editor	: Heryati Suryantini Ricka Resita Isniar Nashihin Nizhamuddin
Editor Prof	: Eni Kustanti
Desain kover dan tata letak	: Rifki Oktiar Rachman Hidayat Raharja

Katalog Dalam Terbitan (Perpustakaan Nasional RI)

Judul dan Penanggung Jawab	: Efisiensi anggaran untuk peningkatan produksi pertanian / Andi Amran Sulaiman, I Ketut Kariyasa, Galih Prabowo, Ahmad Muhtarom, Zia Ulhaq ; editor, Heryati Suryantini, Ricka Resita Isniar
Publikasi	: Bogor, Pertanian Press, 2025
Deskripsi Fisik	: 116 halaman ; 21 cm
Subjek	: Efisiensi Produksi Anggaran Belanja
Klasifikasi	: 658.154 [23]
Perpusnas ID	: https://isbn.perpusnas.go.id/bo-penerbit/penerbit/isbn/data/view-kdt/1239889
Identifikasi	: ISBN 978-979-582-382-7 E-ISBN 978-979-582-383-4 (PDF)

Sumber gambar kover: Unsplash// fajruddin-mudzakkir

Penerbit:

Pertanian Press, Anggota Ikapi

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
Jl. Harsono RM No.3, Ragunan, Jakarta Selatan

Alamat Redaksi:

Balai Besar Perpustakaan dan Literasi Pertanian
Jl. Ir. H. Juanda No.20 Bogor 16122

website: <https://epublikasi.pertanian.go.id/pertanianpress>

Diterbitkan pertama pada 2025 oleh Penerbit Pertanian Press

Tersedia untuk diunduh secara gratis:
epublikasi.pertanian.go.id/pertanianpress



Buku ini di bawah lisensi Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 4.0 International license (CC BY-NC-SA 4.0).

Lisensi ini mengizinkan Anda untuk berbagi, mengopi, mendistribusikan, dan mentransmisi karya untuk penggunaan personal dan bukan tujuan komersial, dengan memberikan atribusi sesuai ketentuan. Karya turunan dan modifikasi harus menggunakan lisensi yang sama.

Informasi detail terkait lisensi CC-BY-NC-SA 4.0 tersedia melalui tautan: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan anugerah dan kesempatan untuk terus berkarya dan berkontribusi pada pembangunan pertanian. Hal ini, tentu untuk mewujudkan negara yang mandiri dan berdaulat dalam pemenuhan pangan.

Suatu kehormatan bagi saya, mendapat amanah besar menjadi Menteri Pertanian sehingga dalam setiap kebijakan yang dilaksanakan serta capaian yang diperoleh merupakan kerja keras bersama. Oleh karena itu, buku ini merupakan persembahan bagi masyarakat Indonesia dan terkhusus kepada pejuang-pejuang pertanian yang telah berkontribusi pada kemajuan pertanian.

Pasca Pandemi Covid-19, masyarakat dunia dihadapkan kepada ancaman krisis pangan yang disebabkan oleh gejolak ekonomi global, *geopolitical tension*, dan perubahan iklim. Kondisi tersebut memengaruhi peta pangan dunia termasuk Indonesia sehingga memerlukan upaya strategis dan taktis dalam menghadapi ancaman krisis pangan.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming telah mencanangkan perwujudan swasembada pangan sebagai salah satu dari Asta Cita Kabinet Merah Putih. Tentu, ini merupakan amanah mulia sekaligus tantangan bagi sektor pertanian dalam menggerakkan

sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan swasembada pangan secepat-cepatnya.

Arah kebijakan anggaran dan belanja negara menjadi salah satu modal utama pencapaian pembangunan nasional termasuk sektor pertanian. Pemerintah telah menegaskan komitmennya bahwa untuk menjaga kesinambungan fiskal diperlukan kebijakan efisiensi dan optimalisasi belanja negara. Efisiensi anggaran bukan sekedar instrumen penghematan, melainkan bagian untuk menciptakan ruang fiskal yang lebih adaptif bagi program prioritas dan memastikan APBN yang dialokasikan menghasilkan dampak yang nyata dan terukur bagi masyarakat.

Kementerian Pertanian (Kementan) secara cepat telah merespons kebijakan keuangan tersebut, bahkan telah mendahuluinya melalui *refocusing* anggaran tahun 2023 dan reprioritasi program dan anggaran tahun 2024. Oleh karena itu, kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 merupakan penguatan implementasi kebijakan strategis perencanaan dan penganggaran sektor pertanian dalam rangka percepatan swasembada pangan.

Langkah strategis melalui program prioritas, seperti optimasi target swasembada pangan. Upaya tersebut telah membuahkan hasil yang secara nyata berdampak pada perkembangan produksi pangan, khususnya subsektor tanaman pangan. Kenaikan produksi padi, terjaganya harga padi di tingkat petani, dan terpenuhinya pupuk bagi petani adalah komponen nyata untuk merepresentasikan perkembangan positif capaian Kementan.

Tentunya, upaya keras yang dilakukan oleh Kementan tidak dilakukan sendiri. Kementan juga merangkul *stakeholder* untuk bersama-sama mewujudkan swasembada pangan sebagai sebuah keniscayaan. Keterlibatan TNI, POLRI, BUMN, swasta, akademisi, dan tentu saja petani sebagai yang terdepan dalam melakukan usaha tani merupakan energi besar untuk percepatan pencapaian target swasembada pangan.

Akhir kata, kami haturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berupaya keras dan konsisten serta mendedikasikan jiwa raganya untuk kemajuan pertanian Indonesia.

Swasembada pangan tidak hanya mencerminkan pencapaian produksi, tetapi merupakan titik tolak bagi perwujudan ketahanan dan kedaulatan pangan yang berkesinambungan. Kementan dengan kebijakan dan terobosannya akan terus menjaga pencapaian swasembada pangan sehingga menjadi bagian penting dalam menapaki cita-cita agung sebagai lumbung pangan dunia menuju Indonesia Emas Tahun 2045.

Andi Amran Sulaiman

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB 1 URGENSI EFISIENSI ANGGARAN	1
A. Krisis Pangan di Awal Tahun 2024	1
B. Terobosan Program dan Anggaran.....	5
BAB 2 STRATEGI EFISIENSI ANGGARAN KEMENTERIAN PERTANIAN	9
A. Reprioritasi Kebijakan Penganggaran Sektor Pertanian	9
B. Reprioritasi Program Kementerian Pertanian Tahun 2024	51
C. Solusi Terhadap Program dan Anggaran Terdampak ..	62
D. Kebijakan Efisiensi Anggaran Kementerian Pertanian TA 2025 melalui Restrukturisasi Anggaran	65
BAB 3 KEBERHASILAN REPRIORITASI ANGGARAN	75
A. Kenaikan Produksi Beras	75
B. Penurunan Impor Beras.....	79
BAB 4 DAYA DUKUNG PROGRAM EFISIENSI ANGGARAN.....	87
A. Respon dan Dampak Efisiensi Anggaran.....	87

B. Upaya Strategis Efisiensi Anggaran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	95
BIOGRAFI PENULIS	99

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Perkembangan inflasi negara tahun 2020–April 2024	4
Tabel 2.	Perkembangan indeks harga beras dunia tahun 2020–2024	4
Tabel 3.	Rekapitulasi <i>refocusing</i> anggaran Kementerian Pertanian	15
Tabel 4.	Pagu per sumber dana per Eselon I	16
Tabel 5.	Pagu per program per Eselon I	17
Tabel 6.	Pagu per jenis belanja per Eselon I	17
Tabel 7.	Rincian kegiatan <i>refocusing</i> TA 2024	21
Tabel 8.	Realokasi anggaran per Eselon I	23
Tabel 9.	Rincian kegiatan <i>refocusing</i> anggaran pompanisasi untuk peningkatan luas tanam TA 2024	27
Tabel 10.	Tambahan <i>refocusing</i> Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	28
Tabel 11.	Realisasi tanam periode 2015–2019 dan 2023–2024	32
Tabel 12.	Analisis penambahan luas areal tanam	35

Tabel 13. Perubahan tambahan <i>refocusing</i> TA 2024 untuk Pompanisasi	36
Tabel 14. Total <i>refocusing</i> per Eselon I TA 2024 untuk Pompanisasi.....	36
Tabel 15. <i>Refocusing</i> kegiatan Pompanisasi TA 2024.....	39
Tabel 16. Usulan ABT Kementerian Pertanian TA 2024	40
Tabel 17. Pergeseran dari BA-BUN belanja lainnya ke BA Kementerian Pertanian (BA 018) TA 2024	42
Tabel 18. Tambahan anggaran dari BA-BUN per unit organisasi dan per program TA 2024	43
Tabel 19. Rincian kegiatan persetujuan sesuai SP SABA TA 2024	44
Tabel 20. <i>Refocusing</i> untuk pemenuhan kebutuhan benih padi dan sarana pendukungnya TA 2024	46
Tabel 21. <i>Refocusing</i> anggaran (pemanfaatan belanja pegawai operasional 001 dan optimalisasi sisa kontrak TA 2024).....	48
Tabel 22. Usulan survei investigasi desain (SID) TA 2024	50
Tabel 23. Data impor beras jenis khusus Januari–Maret tahun 2025	80

DAFTAR GAMBAR

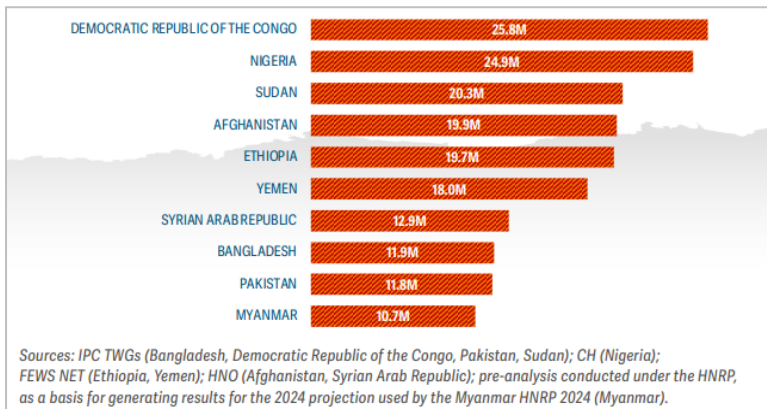
Gambar 1. Negara dan jumlah penduduk yang mengalami krisis pangan 2024	1
Gambar 2. Data <i>stunting</i> , <i>wasting</i> dan <i>overweight</i>	2
Gambar 3. <i>Framework</i> peningkatan produksi pangan (padi dan jagung).....	14
Gambar 4. Alur reprioritasi anggaran tahun 2024.....	15
Gambar 5. Analisis dinamika atmosfer dasarian III Mei 2024	30
Gambar 6. Produksi beras tahun 2023–2024	76
Gambar 7. Luas panen padi tahun 2023–2025	78
Gambar 8. Produksi beras tahun 2023–2025	79
Gambar 9. Konferensi pers pengungkapan pupuk palsu dan rencana perubahan kebijakan impor beras, Selasa (26/11/2024)..	81
Gambar 10. Produk Domestik Bruto (PDB) triwulan I tahun 2025.....	83
Gambar 11. Pelepasan ekspor jagung di Gorontalo tahun 2024	84
Gambar 12. Arahan Menteri Pertanian kepada media di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 30 April 2025	89
Gambar 13. Sinergi kelembagaan mendukung swasembada pangan.....	92

BAB 1

URGENSI EFISIENSI ANGGARAN

A. Krisis Pangan di Awal Tahun 2024

Pasca melewati badai panjang Pandemi Covid-19, harapan masyarakat dunia untuk segera bangkit dan merajut kembali masa depan yang stabil sepertinya menghadapi tantangan baru di tahun 2024. Ancaman krisis pangan yang menyebabkan gejolak dan kerawanan pangan disebabkan oleh kondisi cuaca ekstrem, kondisi geopolitik, dan dampak guncangan ekonomi global. Kondisi tersebut memengaruhi ketersediaan dan kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan, sehingga berdampak pada upaya pemulihan masyarakat secara global.

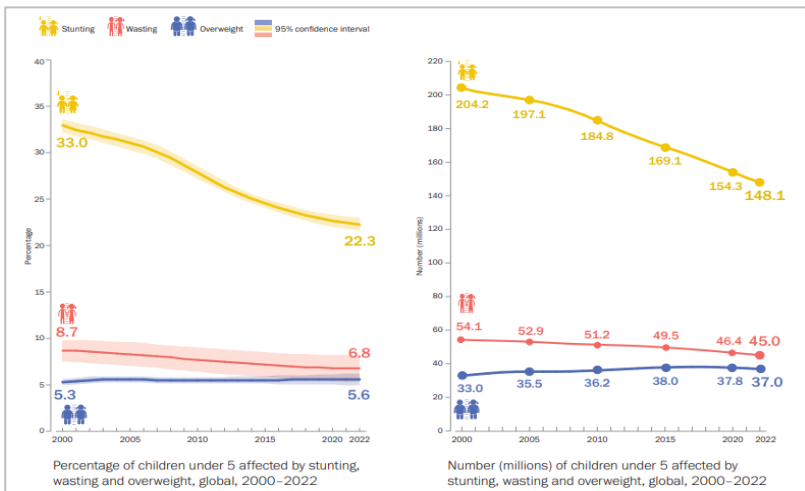


Gambar 1. Negara dan jumlah penduduk yang mengalami krisis pangan 2024

Sumber: GRFC Food Security TWG, 2024

Menurut laporan Food Security Information Network dan Global Network Against Food Crises, bahwa pada tahun 2024 terdapat 176 juta orang (62,5%) dari populasi di 59 negara mengalami kelaparan akut dan membutuhkan bantuan kemanusiaan. Tiga terbesar adalah dari Kongo (25,8 juta), Nigeria (24,9 juta), dan Sudan (20,3 juta).

Kondisi ketidakcukupan pangan secara global dapat terlihat langsung pada kesehatan balita dan anak-anak. Pada tahun 2022, jumlah balita yang mengalami *stunting* sekitar 148,1 juta, 45 juta mengalami *wasting* (kurus akut), dan 37 juta mengalami permasalahan kelebihan berat badan (*overweight*) (WHO, 2023).



Gambar 2. Data *stunting*, *wasting* dan *overweight*

Sumber: WHO, 2023

Dalam dua tahun terakhir, adanya fenomena iklim El Nino telah memberi dampak pada sektor-sektor pertanian secara global. Perubahan iklim berupa cuaca ekstrem seperti kekeringan berkepanjangan menyebabkan pola musim tanam terganggu dan memengaruhi produksi pangan di berbagai belahan dunia.

Ancaman krisis pangan yang mengganggu kestabilan ketahanan pangan juga dipengaruhi oleh adanya kondisi geopolitik berupa konflik antarnegara. Perang Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan dan belum menunjukkan tanda-tanda mereda telah mengganggu distribusi pangan terutama gandum dan minyak nabati. Selain itu, konflik baru di Timur Tengah dan Asia juga memberikan efek domino terhadap stabilitas ekonomi dan perdagangan internasional, sehingga pangan menjadi hal yang tidak terelakkan terkena dampak perubahan iklim dan geopolitik dunia.

Kondisi ekonomi tahun 2024 memberi andil pada ancaman krisis pangan secara global. Berdasarkan rilis International Monetary Fund (IMF) pada April 2024 menjelaskan bahwa beberapa negara mencatatkan inflasi pangan yang sangat tinggi, seperti di Zimbabwe (560,98%), Argentina (249,79%), Sudan (145,53%), Venezuela (99,98%), dan Turkiye (59,52%).

Tabel 1. Perkembangan inflasi negara tahun 2020–April 2024

NEGARA	2020	2021	2022	2023	2024
Zimbabwe	557.21	98.546	193.399	667.361	560.981
Argentina	42.015	48.409	72.431	133.489	249.793
Sudan	163.258	359.092	138.808	171.471	145.535
Venezuela	2,355.15	1,588.51	186.542	337.458	99.981
Türkiye	12.279	19.596	72.309	53.859	59.52
South Sudan	23.984	30.229	-3.21	40.195	54.754
Sierra Leone	13.447	11.874	27.209	47.716	39.118

Sumber: IMF, 2024

Dampak cuaca ekstrem berpengaruh pada harga beras dunia. Badan Pangan Dunia (FAO) menyampaikan bahwa pada periode Januari sampai dengan September 2024, indeks harga beras dunia melonjak tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada periode April 2024 menunjukkan indeks harga beras dunia berada di 135,67 di atas indeks rata-rata tahun 2020–2023, sehingga memberikan informasi perubahan harga yang cukup besar di awal tahun 2024. Kenaikan beras dunia berdampak pada ketersediaan beras dalam negeri. Akibatnya, pada tahun 2024 Indonesia masih melakukan impor untuk pemenuhan kebutuhan beras.

Tabel 2. Perkembangan indeks harga beras dunia tahun 2020–2024

	2020	2021	2022	2023	2024	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24
FAO ALL RICE PRICE INDEX	110.2	105.8	108.8	132.0	133.1	135.6	137.3	136.6	133.3	134.0
Indica Index	114.4	112.2	110.2	138.1	144.7	148.3	150.5	149.8	145.4	145.4
Aromatic Index	97.6	86.9	102.0	113.5	102.9	103.2	103.4	103.0	102.6	105.8
Japonica Index	89.6	101.4	129.4	136.8	101.5	103.4	103.6	98.9	96.8	98.3
Glutinous Index	124.0	87.3	88.5	103.5	107.4	102.2	104.4	106.3	107.0	108.1

Sumber: FAO, 2025

Krisis pangan bukan sekadar isu pertanian atau perdagangan, melainkan krisis multidimensi yang menyentuh ranah kemanusiaan, kesehatan, hingga keberlanjutan lingkungan. Dibutuhkan kolaborasi global yang lebih kuat, kebijakan nasional yang adaptif, dan kesadaran publik tentang pentingnya konsumsi pangan sehat dan berkelanjutan.

Menghadapi tantangan ini, Kementerian Pertanian sebagai lembaga yang terdepan dalam upaya pemenuhan pangan nasional perlu melakukan inovasi dan percepatan perencanaan serta penganggaran agar krisis pangan di Indonesia dapat dihindari.

B. Terobosan Program dan Anggaran

Krisis pangan global pada awal tahun 2024 merupakan akumulasi dari sejumlah tekanan sistemik yang telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Situasi pasca pandemi COVID-19, tekanan iklim seperti El Nino, dan konflik geopolitik berkepanjangan seperti perang Rusia-Ukraina, secara bersamaan menguji daya tahan sistem pangan dunia. Di tengah situasi ini, terlihat bahwa respons biasa-biasa saja tidak lagi memadai. Diperlukan terobosan yang berani dalam bentuk program dan penganggaran publik untuk menghadapi tantangan ketahanan pangan secara komprehensif.

Mempertimbangkan berbagai fakta terkait krisis pangan dunia, sangat tepat apabila visi dan misi pemerintahan Presiden Prabowo dan Gibran diarahkan pada upaya pencapaian swasembada pangan, penyediaan pangan

bergizi, dan peningkatan pendapatan penduduk agar dapat mengakses pangan bergizi dan berimbang. Apabila upaya strategis tersebut dapat terwujud, Indonesia akan dapat membangun ketahanan pangan yang tangguh dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Selain itu, Indonesia juga dapat mencapai kemandirian pangan dan mewujudkan cita-cita sebagai salah satu lumbung pangan dunia. Dengan demikian, kebutuhan pangan, pakan, dan energi hijau dapat dipenuhi secara berkelanjutan.

Dalam periode sebelumnya, Kementerian Pertanian melakukan terobosan *refocusing* anggaran dalam rangka optimalisasi kegiatan, di antaranya (1) upaya khusus komoditas padi, jagung, dan kedelai; (2) upaya khusus komoditas bawang merah dan cabai; (3) upaya khusus komoditas sapi indukan wajib bunting (SIWAB); dan (4) upaya khusus pencapaian swasembada gula. Menghadapi ancaman krisis pangan global, *refocusing* program dan anggaran belum cukup membawa sektor pertanian untuk mengatasi ancaman tersebut. Untuk itu, Kementerian Pertanian melakukan terobosan melalui reprioritasi program dan anggaran Kementerian Pertanian.

Reprioritasi dan restrukturisasi program dan anggaran Kementerian Pertanian menetapkan fokus utama pengalokasian anggaran untuk pencapaian swasembada pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya tanpa mengurangi esensi dari tugas Kementerian Pertanian. Reprioritasi dan restrukturisasi juga dilakukan melalui penentuan skala prioritas target yang ingin dicapai oleh

Kementerian Pertanian. Dukungan untuk sektor pangan dan pertanian dilakukan melalui pemanfaatan sumber pendanaan dan pembiayaan inovatif. Hal ini termasuk dalam pelibatan sektor swasta sebagai sumber daya tambahan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

Situasi krisis pangan saat ini merupakan alarm keras bahwa dunia membutuhkan arah baru dalam kebijakan dan implementasi program ketahanan pangan. Pendekatan konvensional perlu diganti dengan strategi yang holistik, inklusif, dan adaptif. Terobosan dalam program dan anggaran bukan hanya soal teknis, tetapi juga soal keberpihakan politik, komitmen anggaran, dan keberanian untuk melampaui zona nyaman birokrasi. Kepemimpinan kuat dan visi misi yang jelas merupakan upaya terobosan program dan anggaran untuk memuluskan pencapaian swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

BAB 2

STRATEGI EFISIENSI ANGGARAN KEMENTERIAN PERTANIAN

A. Reprioritasi Kebijakan Penganggaran Sektor Pertanian

1. Kebijakan Anggaran Ketahanan Pangan Tahun 2024

Pada tahun 2024, kebijakan ketahanan pangan berfokus pada upaya peningkatan ketersediaan dan stabilitas harga. Selain itu, kebijakan tersebut bertujuan memperkuat aspek pascapanen dan pengolahan guna menambah nilai ekonomi komoditas pertanian. Strategi ini diwujudkan melalui berbagai langkah, yaitu

- a. Peningkatan produksi komoditas strategis;
- b. Penguatan kelembagaan dan akses pembiayaan bagi petani;
- c. Perlindungan pelaku usaha tani;
- d. Modernisasi sistem pertanian;
- e. Pengembangan kawasan sentra produksi pangan;
- f. Penguatan sistem perbenihan dan pembibitan; dan
- g. Pengembangan industri pengolahan dan pemasaran hasil pertanian maupun peternakan.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, mengalokasikan anggaran untuk

Kementerian Pertanian direncanakan sebesar Rp14.658,1 miliar. Dana tersebut bersumber dari berbagai pos, dengan proporsi terbesar berasal dari rupiah murni sebesar Rp13.772,6 miliar atau sekitar 93,96%. Sumber lainnya meliputi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp283,9 miliar (1,94%), Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp67,4 miliar (0,46%), pinjaman luar negeri (PLN) sebesar Rp237,7 miliar (1,62%), hibah luar negeri (HLN) sebesar Rp1,5 miliar (0,01%), dan surat berharga syariah negara (SBSN) sebesar Rp295,5 miliar (2,01%). Jika dibandingkan dengan pagu anggaran tahun 2023, alokasi ini mengalami penurunan sebesar Rp660,6 miliar atau sekitar 4,31%.

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian pada tahun 2024 berpedoman pada rencana kerja pemerintah (RKP) yang mengusung tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Kebijakan ini merupakan bagian dari pelaksanaan agenda pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020–2024, yang dijabarkan dalam sejumlah prioritas nasional (PN) dan program prioritas (PP). Kementerian Pertanian berperan dalam mendukung pelaksanaan prioritas nasional 1 (PN1), yaitu memperkuat ketahanan ekonomi guna mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

Dukungan ini difokuskan pada pelaksanaan PP3 terkait peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan, serta PP6 yang menitikberatkan pada peningkatan nilai tambah, penciptaan lapangan kerja, investasi sektor riil,

dan industrialisasi. Untuk mendukung pelaksanaan PN dan PP tersebut, Kementerian Pertanian menjalankan empat program utama, yaitu: (1) Program ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas; (2) Program nilai tambah dan daya saing industri; (3) Program pendidikan dan pelatihan vokasi; serta (4) Program dukungan manajemen.

Pelaksanaan program pembangunan tahun 2024 diarahkan sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia, yang menekankan penyelesaian seluruh kegiatan pembangunan terutama di sektor pertanian yang termasuk dalam kategori prioritas nasional, *major project*, dan proyek strategis nasional, pada tahun berjalan. Fokus utama kebijakan ini ditujukan untuk mendukung empat tema prioritas pembangunan, yaitu penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan angka *stunting*, pengendalian inflasi, serta penguatan daya saing dan peningkatan investasi. Menyelaraskan dengan arahan tersebut, Kementerian Pertanian menetapkan lima prioritas utama dalam program pembangunan pertanian tahun 2024.

Pertama, peningkatan produksi dalam negeri melalui optimalisasi penyaluran sarana dan prasarana, pemanfaatan lahan secara maksimal, pengendalian hama dan dampak perubahan iklim, penyediaan benih dan bibit berkualitas, serta penguatan kapasitas petani. Kedua, penguatan kelembagaan petani disertai dukungan pembiayaan dan perlindungan terhadap usaha tani. Ketiga, percepatan pembangunan serta rehabilitasi infrastruktur pangan. Keempat, pengembangan kawasan *food estate* sebagai pusat produksi skala luas. Kelima, penguatan cadangan

pangan nasional guna menjaga ketahanan dan ketersediaan pangan jangka panjang.

2. Implementasi Awal Reprioritasi Kebijakan Penganggaran Sektor Pertanian

Amanah yang kembali diemban sebagai Menteri Pertanian oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu, 23 Oktober 2023 di Istana Negara menandai babak baru dalam arah kebijakan pembangunan pertanian nasional. Momen tersebut menjadi titik awal dilakukannya reprioritasi kebijakan anggaran di sektor pertanian. Di hari pertama menjabat, melakukan kunjungan ke kantor pusat Kementerian Pertanian dan menegaskan bahwa fokus utama kerja selama setahun ke depan adalah memperkuat produksi padi dan jagung, mengurangi ketergantungan pada impor, serta mewujudkan swasembada pangan.

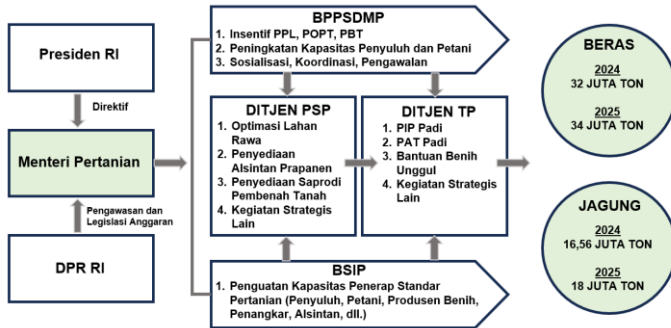
Upaya tersebut ditempuh melalui kebijakan penganggaran yang efisien dan tepat sasaran. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden agar Indonesia meningkatkan kapasitas produksi pangan strategis. Kementerian Pertanian juga menyampaikan optimisme bahwa target-target tersebut dapat dicapai, sebagaimana keberhasilan serupa yang pernah diraih pada tahun 2017 dan 2021.

Komitmen kuat mulai terealisasi pada akhir Tahun Anggaran 2023 melalui kebijakan *refocusing* anggaran sebesar Rp1 triliun untuk mendukung pelaksanaan program upaya khusus (Upsus) percepatan tanam dalam rangka peningkatan produksi padi dan jagung. Program ini

merupakan langkah strategis untuk menjamin ketersediaan pangan nasional di tengah ancaman krisis pangan global dan dampak El Nino. Implementasinya melibatkan setidaknya empat unit Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian, yaitu Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, serta Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, dengan dukungan dari unit-unit lainnya.

Setiap unit memiliki peran strategis dalam merancang dan melaksanakan kegiatan secara terintegrasi, seperti peningkatan indeks pertanaman (PIP), perluasan areal tanam (PAT) untuk padi dan jagung, optimasi lahan rawa, mekanisasi pertanian, serta penguatan kapasitas SDM pertanian melalui penyuluhan dan pelatihan teknis.

Dalam pelaksanaannya, program ini berlandaskan pada sejumlah faktor kunci yang saling terkait dan saling memperkuat, antara lain ketersediaan lahan produktif, benih unggul, akses terhadap pupuk dan pestisida, sistem pengairan yang memadai, serta teknologi mekanisasi dan penguatan sumber daya manusia. Seluruh elemen tersebut harus disinergikan oleh unit terkait di Kementerian Pertanian guna meningkatkan produksi padi dan jagung. Upaya ini juga sebagai target jangka pendek pada periode 2024–2025, sekaligus bagian dari visi besar menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia pada tahun 2033.



Gambar 3. *Framework* peningkatan produksi pangan (padi dan jagung)

Sumber: Blueprint Upsus peningkatan produksi padi dan jagung, 2023

Upaya peningkatan produksi Upsus dilakukan melalui beberapa strategi, yaitu: (1) Peningkatan IP dan areal tanam; (2) Melakukan optimasi lahan dan memperkuat mekanisasi pertanian; (3) Penguatan sumber daya manusia pertanian melalui kegiatan penyuluhan dan bimbingan teknis petani; dan (4) Bimbingan teknis standardisasi pertanian. Dalam menjalankan strategi tersebut diperlukan dukungan ketersediaan anggaran Kementerian Pertanian melalui *refocusing* anggaran pada akhir TA 2023.

Langkah *refocusing* anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian memperoleh dukungan penuh dari Pimpinan Komisi IV DPR RI. Dukungan tersebut ditegaskan melalui hasil kesimpulan dan keputusan dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI yang berlangsung pada 13 November 2023. Dalam rapat tersebut, disepakati sejumlah rincian dan arahan yang menjadi dasar pelaksanaan

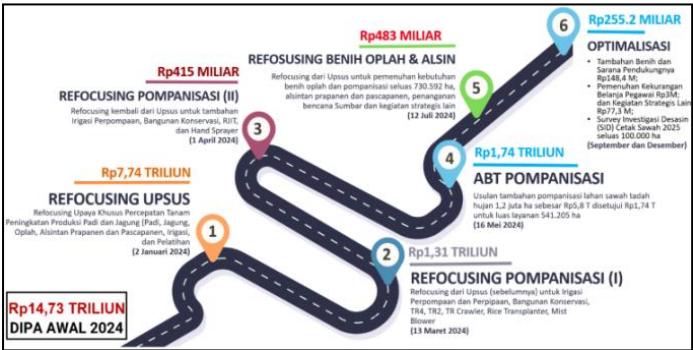
refocusing anggaran untuk mendukung prioritas strategis pembangunan pertanian nasional.

Tabel 3. Rekapitulasi *refocusing* anggaran Kementerian Pertanian

NO	PERUBAHAN	VOL.		HARGA SATUAN	ANGGARAN (Rp)
	TOTAL OPTIMALISASI				1,000,000,000,000
A	DITJEN TANAMAN PANGAN				934,000,000,000
1	JAGUNG				390,750,000,000
	Benih Jagung	200,000	Ha	900,000	180,000,000,000
	Saprodi Jagung	150,000	Ha	1,405,000	210,750,000,000
2	PADI				189,250,000,000
	Benih Padi	150,000	Ha	325,000	48,750,000,000
	Saprodi Padi	100,000	Ha	1,405,000	140,500,000,000
3	ALSINTAN PASCAPANEN				324,220,000,000
	Combine Harvester Besar	754	Unit	430,000,000	324,220,000,000
4	Koordinasi Pendampingan	1	Paket	-	29,780,000,000
B	BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN				30,000,000,000
1	Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian	1	Paket	-	30,000,000,000
C	BADAN PPSDM PERTANIAN				36,000,000,000

Sumber: Usulan Revisi Anggaran (Surat Menteri Pertanian ke Menteri Keuangan Nomor B-251/RC.110/M/11/2023, 13 November 2023)

3. Keberlanjutan Reprioritasi Kebijakan Sektor
Pertanian Tahun Anggaran 2024



Gambar 4. Alur reprioritasi anggaran tahun 2024
Sumber: Biro Perencanaan, 2024

Mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024, alokasi anggaran yang ditetapkan untuk Kementerian Pertanian mencapai sebesar Rp14.734.899.511.000,00. Sesuai dengan DIPA yang telah ditetapkan pada tanggal 30 November 2023, komposisi anggaran Kementerian Pertanian telah sesuai dengan yang dituangkan dalam Renja dan RKA-K/L TA 2024 dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 4. Pagu per sumber dana per Eselon I

No	Eselon I	Sumber Dana (Rp000)						Total (Rp000)
		RM	PNBP	BLU	PLN	HLN	SBSN	
018	TOTAL	13.849.395.433	283.876.409	67.440.500	237.674.281	1.513.125	294.999.763	14.734.899.511
1	SETJEN	1.503.995.212	3.834.355	-	-	-	-	1.507.829.567
2	ITJEN	124.237.528	-	-	-	-	-	124.237.528
3	DITJEN TP	3.001.101.763	1.150.893	-	-	-	-	3.002.252.656
4	DITJEN HORTI	1.001.491.086	-	-	5.000.000	-	-	1.006.491.086
5	DITJEN BUN	1.066.246.770	1.219.059	-	-	-	-	1.067.465.829
6	DITJEN PKH	2.227.951.066	33.360.465	67.440.500	-	-	214.299.763	2.543.051.794
7	DITJEN PSP	2.425.954.390	-	-	150.000.000	-	-	2.575.954.390
8	BSIP	884.915.149	15.516.313	-	25.000.000	-	50.000.000	975.431.462
9	BPPSDMP	849.351.651	7.672.324	-	57.674.281	1.513.125	30.700.000	946.911.381
10	BARANTAN	764.150.818	221.123.000	-	-	-	-	985.273.818

Sumber: Lampiran I Usulan Rencana Kerja dan Anggaran TA 2024 (Surat Menteri Pertanian ke Menteri Keuangan Nomor 221/RC.110/M/10/2023, 19 Oktober 2023).

Tabel 5. Pagu per program per Eselon I

No	Eselon I	Program (Rp000)				Jumlah (Rp000)
		Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Dukungan Manajemen	
018	TOTAL	8,197,523,294	1,422,474,962	641,270,320	4,473,630,935	14,734,899,511
1	SETJEN	-	-	-	1,507,829,567	1,507,829,567
2	ITJEN	-	-	-	124,237,528	124,237,528
3	DITJEN TP	2,576,665,655	263,225,220	-	162,361,781	3,002,252,656
4	DITJEN HORTI	754,756,868	125,811,622	-	125,922,596	1,006,491,086
5	DITJEN BUN	-	871,873,120	-	195,592,709	1,067,465,829
6	DITJEN PKH	2,124,244,393	33,565,000	-	385,242,401	2,543,051,794
7	DITJEN PSP	2,410,573,368	-	-	165,381,022	2,575,954,390
8	BSIP	77,000,000	128,000,000	-	770,431,462	975,431,462
9	BPPSDMP	-	-	641,270,320	305,641,061	946,911,381
10	BARANTAN	254,283,010	-	-	730,990,808	985,273,818

Sumber: Lampiran II Usulan Rencana Kerja dan Anggaran TA 2024 (Surat Menteri Pertanian ke Menteri Keuangan Nomor 221/RC.110/M/10/2023, 19 Oktober 2023).

Tabel 6. Pagu per jenis belanja per Eselon I

No	Eselon I	Jenis Belanja (Rp000)			Jumlah (Rp000)
		Belanja Pegawai (001)	Belanja Barang Ops. (002)	Belanja Non Operasional (Rp000)	
018	TOTAL	2.261.921.049	1.132.224.342	11.340.754.120	14.734.899.511
1	SETJEN	1.169.053.071	130.352.676	208.423.820	1.507.829.567
2	ITJEN	22.463.360	6.070.389	95.703.779	124.237.528
3	DITJEN TP	56.307.720	26.183.226	2.919.761.710	3.002.252.656
4	DITJEN HORTI	25.370.686	18.000.000	963.120.400	1.006.491.086
5	DITJEN BUN	57.736.686	24.175.374	985.553.769	1.067.465.829
6	DITJEN PKH	146.908.883	176.674.344	2.219.468.567	2.543.051.794
7	DITJEN PSP	25.800.000	15.000.000	2.535.154.390	2.575.954.390
8	BSIP	294.806.914	327.257.724	353.366.824	975.431.462
9	BPPSDMP	144.282.291	99.798.483	702.830.607	946.911.381
10	BARANTAN	319.191.438	308.712.126	357.370.254	985.273.818

Sumber: Lampiran II Usulan Rencana Kerja dan Anggaran TA 2024 (Surat Menteri Pertanian ke Menteri Keuangan Nomor 221/RC.110/M/10/2023, (19 Oktober 2023)

Efisiensi belanja kementerian/lembaga sudah pernah dilakukan pemerintah melalui Kementerian Keuangan sejak awal pandemi Covid-19 pada TA 2020 melalui mekanisme pencadangan anggaran atau sering disebut dengan istilah *automatic adjustment*. *Automatic adjustment* adalah kebijakan pemerintah untuk menyesuaikan belanja negara secara otomatis yang bertujuan untuk menjaga ketahanan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). *Automatic adjustment* tidak mengurangi pagu total, hanya bersifat blokir (anggaran tidak dapat dilaksanakan). Berdasarkan alokasi anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA tahun anggaran 2024, terdapat blokir *automatic adjustment* awal sebesar Rp453.043.044.000,00 sebagaimana ditetapkan dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023.

Kementerian Pertanian berupaya menjamin ketersediaan pangan masyarakat melalui peningkatan produksi dalam negeri. Hal ini dilakukan untuk menghadapi berbagai tantangan, seperti dampak El Nino yang menyebabkan turunnya produksi pangan, gangguan distribusi pangan akibat tekanan global, dan pembatasan ekspor yang berasal dari negara penghasil pangan. Untuk itu, Kementerian Pertanian melakukan upaya-upaya strategis melalui *refocusing* kegiatan dan anggaran berupa:

a. *Refocusing* Anggaran Mendukung Keberlanjutan Upaya Khusus (Upsus) Percepatan Tanam Upaya Peningkatan Produksi Padi dan Jagung sebesar Rp 7,74 Triliun

Keberlanjutan upaya khusus (Upsus) percepatan dan perluasan tanam untuk meningkatkan produksi padi dan jagung bukan hanya sebagai respons terhadap tantangan pemenuhan kebutuhan pangan nasional, tetapi untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Serangkaian kegiatan Upsus mencakup peningkatan indeks pertanaman (IP) dan perluasan areal tanam (PAT), optimasi lahan rawa (Oplah Rawa), mekanisasi, perbaikan sistem pengairan, serta pelatihan peningkatan kapasitas SDM petani/penyuluh/penerap standar instrumen pertanian, penguatan kelembagaan, penyuluhan, dan SDM pertanian.

Produksi beras yang tidak meningkat pada tahun 2022 dan diprediksi turun di tahun 2023 akibat El Nino menyebabkan stok beras berkurang, sementara kebutuhan meningkat. Kondisi ini mengancam ketahanan pangan nasional, terutama karena daya beli masyarakat masih rendah akibat belum pulihnya ekonomi nasional setelah pandemi Covid-19.

Produksi beras juga terpengaruh oleh kelangkaan dan kenaikan harga pupuk, serta menurunnya kinerja alat mesin pertanian (alsintan). Menurut data BPS (KSA Amatan Januari 2024), produksi beras nasional tahun 2023 diperkirakan turun dari sebelumnya 31,54 juta ton tahun 2022 menjadi 31,10 juta ton. Sebagai antisipasi penurunan

produksi di tahun 2024, target sebesar 32 juta ton harus tercapai. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya khusus untuk peningkatan produksi agar ketersediaan pangan dari dalam negeri tetap terjamin.

Swasembada jagung yang tercapai pada tahun 2018 mengalami penurunan, sehingga impor jagung diperlukan untuk memenuhi kebutuhan domestik. Data BPS menunjukkan luas panen jagung pada tahun 2023 diperkirakan turun 0,28 juta hektar (10,03%) dibandingkan tahun 2022 menjadi sebesar 2,49 juta hektar. Produksi jagung pipilan kering tahun 2023 diperkirakan mencapai 14,46 juta ton, turun sebanyak 2,07 juta ton (12,5%) dibandingkan tahun sebelumnya.

Upsus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung merupakan inisiatif strategis yang melibatkan 7 (tujuh) Unit Eselon I di Kementerian Pertanian, yakni Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Ditjen Hortikultura, Ditjen Perkebunan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, dan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian dengan pengampu utama kegiatan Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

Keberlanjutan pelaksanaan program upaya khusus (Upsus) tidak hanya dimaksudkan sebagai respons atas dinamika pemenuhan kebutuhan pangan nasional, tetapi juga menjadi bagian integral dari strategi jangka panjang untuk mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Beragam kegiatan dalam Upsus ini mencakup peningkatan indeks pertanaman (IP) dan perluasan areal

tanam (PAT), optimasi lahan rawa (Oplah Rawa), penerapan mekanisasi pertanian, perbaikan sistem irigasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia petani, penyuluh, dan pelaksana standar instrumen pertanian. Selain itu, penguatan kelembagaan dan kegiatan penyuluhan turut menjadi komponen penting dalam mendukung keberhasilan program ini.

Mengingat pengusulan anggaran belanja tambahan (ABT) tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pada awal tahun berjalan, maka langkah cepat yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian adalah melalui pendekatan *refocusing/realokasi* untuk reprioritasi anggaran sebesar Rp7,74 triliun. Reprioritasi dalam hal ini adalah merealokasi kegiatan eksisting yang ada Eselon I pada awal tahun menjadi kegiatan yang tingkat urgensinya lebih mendesak untuk dilaksanakan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Tabel 7. Rincian kegiatan *refocusing* TA 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN	REFOCUSING		
		VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	ANGGARAN (Rp)
	TOTAL REFOCUSING			7,741,862,053,000
I	PENGEMBANGAN PADI	Ha	1,620,000	5,441,407,053,000
A	Pengembangan Padi Reguler 2024 mendukung target produksi 30,8 juta ton	Ha	995,000	822,173,072,000
1	Kawasan Padi Biofortifikasi	Ha	200,000	349,000,000,000
2	Bantuan Benih Padi Inbrida (Benih Padi Inbrida)	Ha	795,000	270,300,000,000
3	Pengendalian OPT dan DPI (Gerdal dan Pestisida)	Ha	100,000	100,000,000,000
4	Kegiatan Perlindungan Lainnya (Honor POPT 1 Tahun, BBPOPT, BPMPT)	Paket	1	61,217,680,000
5	Pembinaan Padi (Sosialisasi, Pembinaan, Monev)	Paket	1	41,655,392,000
B	Tambahan Pengembangan Produksi Padi:			4,619,233,981,000
B.1	Tambahan Pengembangan Padi Non Rawa (625.000 ha)	Ha	625,000	1,476,178,000,000
1	Benih dan Pupuk:			370,650,000,000
-	Benih Padi	Ha	625,000	212,500,000,000
-	Saprodi Padi	Ha	100,000	140,500,000,000
-	Operasional	Paket	1	17,650,000,000

Efisiensi Anggaran untuk
Peningkatan Produksi Pertanian

2	Alsintan Pengembangan Padi:				982,000,000,000
a	Alsintan Prapanen:				362,000,000,000
-	Traktor Roda 4	Unit	550	380,000,000	209,000,000,000
-	Traktor Roda 2	Unit	1,500	32,000,000	48,000,000,000
-	Pompa Air	Unit	1,250	24,000,000	30,000,000,000
-	Hand Sprayer	Unit	60,000	1,000,000	60,000,000,000
-	Operasional	Paket	1	15,000,000,000	15,000,000,000
b	Alsintan Pascapanen:				620,000,000,000
-	Combine Harvester	Unit	1,400	430,000,000	602,000,000,000
-	Operasional	Paket	1	18,000,000,000	18,000,000,000
3	Irigasi Pertanian Pengembangan Padi:				85,000,000,000
a	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT)	Unit	1,000	75,000,000	75,000,000,000
b	Operasional mendukung Kegiatan Irigasi Pertanian	Paket	1	10,000,000,000	10,000,000,000
4	Asuransi Pertanian Usaha Tani Padi (AUTP):				38,528,000,000
a	Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	Ha	200,000	144,000	28,800,000,000
b	Operasional mendukung Kegiatan Pembiayaan Pertanian	Paket	1	9,728,000,000	9,728,000,000
B.2	Tambahan Pengembangan Padi Melalui Optimasi Lahan Rawa				3,143,055,981,000
1	Penyiapan Lahan:				2,377,000,000,000
a	SID Lahan Rawa	Ha	400,000	250,000	100,000,000,000
b	Konstruksi Optimasi Lahan	Ha	400,000	5,500,000	2,200,000,000,000
c	Operasional	Paket	1	77,000,000,000	77,000,000,000
2	Pupuk dan Pestisida Optimasi Lahan:				260,000,000,000
a	Dolomit untuk Optimasi lahan	Ton	100,000	2,500,000	250,000,000,000
b	Operasional	Paket	1	10,000,000,000	10,000,000,000
3	Alsintan Optimasi Lahan:				506,055,981,000
a	Traktor Roda 4	Unit	200	380,000,000	76,000,000,000
b	Traktor Roda 2	Unit	1,500	32,000,000	48,000,000,000
c	Hand Sprayer	Unit	30,000	1,000,000	30,000,000,000
d	Excavator Standar	Unit	120	2,350,000,000	282,000,000,000
-	BBM dan Operasional	Paket	1	31,774,080,000	31,774,080,000
-	Pengawas Alat	Unit	120	26,400,000	3,168,000,000
-	Mobilisasi dan Demobilisasi Alat	Unit	120	110,000,000	13,200,000,000
e	Operasional	Paket	1	21,913,901,000	21,913,901,000
II	PENGEMBANGAN JAGUNG	Ha	2,000,000		2,195,455,000,000
A	Pengembangan Jagung Reguler 2024 mendukung target produksi 14,46 juta ton	Ha	400,000	936,000	379,800,000,000
1	Bantuan Benih Jagung Hibrida	Hektar	400,000	900,000	360,000,000,000
2	Pembinaan Jagung	Paket	1	19,800,000,000	19,800,000,000
B	Pengembangan Jagung (1.600.000 ha)	Ha	1,600,000		1,815,655,000,000
1	Bantuan Benih Jagung Hibrida	Ha	1,600,000	900,000	1,440,000,000,000
2	Saprodi Jagung	Ha	200,000	1,405,000	281,000,000,000
3	Operasional	Paket	1	94,655,000,000	94,655,000,000
III	PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS PETANI/PENYULUH/PENERAP STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN				105,000,000,000
1	Ditjen Hortikultura	Paket	1	25,000,000,000	25,000,000,000
2	Ditjen Perkebunan	Paket	1	25,000,000,000	25,000,000,000
3	Badan PPSDM Pertanian	Paket	1	30,000,000,000	30,000,000,000
4	Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	Paket	1	25,000,000,000	25,000,000,000

Sumber: Usulan *refocusing*/realokasi anggaran Kementerian Pertanian TA 2024 (Surat Menteri Pertanian ke Menteri Keuangan Nomor B-01/RC.110/M/01/2024, 02 Januari 2024).

Tabel 8. Realokasi anggaran per Eselon I

No	Eselon I	Pagu Awal (Rp)	Realokasi (Rp)		Pagu Menjadi (Rp)
			Internal	Eksternal	
	TOTAL	14,734,899,511,000	5,124,032,965,000	-	14,734,899,511,000
1	Sekretariat Jenderal	1,507,829,567,000	-	-	1,507,829,567,000
2	Inspektorat Jenderal	124,237,528,000	-	-	124,237,528,000
3	Ditjen Tanaman Pangan	3,002,252,656,000	2,838,739,982,000	1,169,538,090,000	4,171,790,746,000
4	Ditjen Hortikultura	1,006,491,086,000	25,000,000,000	(573,852,365,000)	432,638,721,000
5	Ditjen Perkebunan	1,067,465,829,000	25,000,000,000	(356,774,780,000)	710,691,049,000
6	Ditjen Peternakan dan Kewan	2,543,051,794,000	-	(1,635,201,943,000)	907,849,851,000
7	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	2,575,954,390,000	2,180,292,983,000	1,448,290,998,000	4,024,245,388,000
8	Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	975,431,462,000	25,000,000,000	(52,000,000,000)	923,431,462,000
9	Badan PPSPM Pertanian	946,911,381,000	30,000,000,000	-	946,911,381,000
10	Badan Karantina Indonesia	985,273,818,000	-	-	985,273,818,000
Total Realokasi (+)			7,741,862,053,000		

Sumber: Usulan *refocusing*/realokasi anggaran TA 2024 (Surat Menteri Pertanian ke Menteri Keuangan Nomor B-01/RC.110/M/01/2024, 02 Januari 2024)

Refocusing anggaran Kementerian Pertanian TA 2024 dilakukan dengan mengoptimalkan anggaran internal dan menggeser anggaran antar-Eselon I. Karena tidak mengubah total anggaran per program, proses ini tidak memerlukan persetujuan Komisi IV DPR RI. Seluruh proses usulan revisi telah dilaksanakan dan DIPA revisi secara menyeluruh telah terbit pada awal Januari 2024.

b. *Refocusing* Anggaran untuk pompanisasi Air Sungai untuk Peningkatan Luas Tanam Padi Rp1,3 Triliun (Tahap I)

Data BPS menunjukkan bahwa luas tanam padi selama masa tanam Oktober 2023–Februari 2024, yaitu 5,49 juta

hektare. Angka ini turun 1,95 juta hektare (26,2%) dibandingkan dengan rerata periode yang sama tahun 2015–2019, yaitu 7,44 juta hektare. Penurunan luas tanam ini sangat memengaruhi luas panen padi yang berdampak pada penurunan produksi padi yang dihasilkan.

Selain karena penurunan luas tanam padi yang berdampak pada turunnya produksi padi, Kementerian Pertanian telah mengidentifikasi beberapa penyebab tidak optimalnya produksi padi, yaitu volume pupuk bersubsidi yang berkurang (hanya 4,7 juta ton atau 50% dari alokasi tahun-tahun sebelumnya), tidak semua petani mendapatkan akses pupuk bersubsidi seperti Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), serta dampak dari perubahan iklim seperti El Nino yang masih berlangsung saat ini.

Kementerian Pertanian menyatakan dan memastikan bahwa kebutuhan beras pada bulan Maret hingga Mei 2024 dalam kondisi aman, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan pangan selama Ramadhan dan Idul Fitri 1445 Hijriah. Kekhawatiran selanjutnya adalah produksi pada bulan Juni sampai dengan Oktober 2024 dikarenakan luas tanam padi pada Februari 2024 ini lebih rendah dibandingkan periode 2019–2023. Kondisi harga beras yang saat ini naik rata-rata 56% sebagai dampak El Nino diidentifikasi Kementerian Pertanian sebagai darurat pangan yang harus segera dicarikan solusinya.

Kementerian Pertanian telah menyusun solusi cepat peningkatan produksi padi tahun 2024, yaitu:

- 1) Optimasi lahan rawa mineral seluas 400.000 hektare di 10 provinsi untuk menambah luas areal pertanaman padi.
- 2) Mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi menjadi 9,55 juta ton. Pengambilan pupuk bersubsidi boleh menggunakan KTP, mengingat alokasi pupuk bersubsidi dalam 5 tahun terakhir menurun dibanding tahun 2014–2018 yang mencapai 9,55 juta ton. Bahkan di tahun 2024, alokasi pupuk bersubsidi hanya sebesar 4,73 juta ton.
- 3) Memanfaatkan potensi air sungai melalui pompanisasi dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp1,3 triliun.

Pompanisasi/irigasi perpompaan adalah sistem irigasi dengan menggunakan pompa air yang pendistribusiannya melalui saluran terbuka maupun tertutup. Pemanfaatan pompanisasi/irigasi perpompaan, di antaranya 1) lahan sawah tadah hujan terutama yang berdekatan dengan sungai atau memanfaatkan air tanah sebagai sumber airnya; 2) lokasi eksisting yang terancam kekeringan; dan 3) lokasi diprioritaskan pada lahan tadah hujan/sawah tadah hujan dengan IP 0--1 dan dibudidayakan (diusahakan) oleh petani dengan komoditas padi serta punya potensi penambahan areal tanam.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), luas tanam padi selama periode Oktober 2023 hingga Februari 2024 tercatat sebesar 5,49 juta hektare. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 1,95 juta hektare atau sekitar 26,2 persen dibandingkan rata-rata luas tanam pada

periode yang sama tahun 2015–2019 yang mencapai 7,44 juta hektare. Penurunan ini secara langsung berdampak pada penurunan luas panen dan berujung pada penurunan total produksi padi nasional.

Selain itu, Kementerian Pertanian juga mengidentifikasi sejumlah faktor lain yang turut menyebabkan menurunnya produksi padi, antara lain berkurangnya volume pupuk bersubsidi yang hanya tersedia sebesar 4,7 juta ton atau sekitar separuh dari alokasi tahun-tahun sebelumnya. Akses terhadap pupuk subsidi pun belum merata, karena tidak seluruh petani, termasuk yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), dapat menjangkaunya. Di samping itu, perubahan iklim ekstrem akibat El Nino yang masih berlangsung juga memperparah kondisi produksi padi.

Kegiatan pompanisasi akan dilaksanakan di lahan sawah tadah hujan atau lahan sawah yang kekurangan air irigasi, namun masih mempunyai potensi sumber air permukaan. Lokasi tersebut harus memungkinkan dapat dioptimalkan dan berpotensi untuk menambah luas tanam (peningkatan IP). Potensi sumber air di lokasi tersebut juga diharapkan memungkinkan untuk dilakukan pompanisasi hingga akhir musim pertanaman. Untuk itu, dari potensi luas lahan tadah hujan sekitar 3 juta hektare di-*overlay* dengan sungai-sungai besar dan kecil dengan buffer 500 m kiri kanan sungai tersebut maka diperoleh sekitar 2,1 juta hektar lahan tadah hujan yang potensial dilakukan kegiatan pompanisasi untuk mendukung penambahan luas tanam dengan mengoptimalkan sumber air sungai yang ada.

Realokasi kegiatan dan anggaran pompanisasi bersumber dari *refocusing* anggaran Upsus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi TA 2024 sebesar Rp7,74 triliun. Penggunaan kegiatan dan anggaran memperhatikan tingkat urgensi dan kepentingan serta ketersediaan anggaran lingkup Kementerian Pertanian TA 2024. Rincian kegiatan sebagai berikut:

Tabel 9. Rincian Kegiatan *refocusing* anggaran pompanisasi untuk peningkatan luas tanam TA 2024

NO	RINCIAN KEGIATAN / ITEM	VOLUME		HARGA SATUAN (Rp)	ANGGARAN (Rp)
	TOTAL REFOCUSING				1.308.929.472.000
1	Irigasi Perpompaan	Unit	3.634	120.000.000	436.080.000.000
2	Pompa Air	Unit	19.696	30.800.000	606.636.800.000
3	Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali	Unit	300	120.000.000	36.000.000.000
4	Traktor Roda 4	Unit	250	380.000.000	95.000.000.000
5	Traktor Roda 2	Unit	2.000	32.000.000	64.000.000.000
6	Rice Transplanter	Unit	30	81.000.000	2.430.000.000
7	Tractor Crawler	Unit	30	350.000.000	10.500.000.000
8	Mist Blower	Unit	300	3.500.000	1.050.000.000
9	Sistem/Aplikasi Pupuk Bersubsidi	Sistem	1	7.608.080.000	7.608.080.000
10	Operasional	Paket	1	49.624.592.000	49.624.592.000

Sumber: Usulan *refocusing*/realokasi anggaran TA 2024 untuk pompanisasi air sungai peningkatan luas tanam padi (Surat Menteri Pertanian ke Menteri Keuangan Nomor B-38/RC.110/M/03/2024, 13 Maret 2024).

Total anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan *refocusing* mencapai Rp1,31 triliun. Dana tersebut berasal dari dua unit Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian, yakni Direktorat Jenderal Tanaman Pangan serta Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, yang masing-masing menyumbang porsi anggaran guna mendukung pelaksanaan program prioritas percepatan produksi padi dengan alokasi sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Tambahan *refocusing* Ditjen Tanaman Pangan dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

NO	ESELON I / UNIT KERJA	PAGU SEMULA (Rp)	REALOKASI (Rp)		PAGU MENJADI (Rp)
			INTERNAL	EKSTERNAL	
	TOTAL	13,563,435,046,000			13,563,435,046,000
1	Sekretariat Jenderal	1,266,153,412,000	-	-	1,266,153,412,000
2	Inspektorat Jenderal	124,237,528,000	-	-	124,237,528,000
3	Ditjen Tanaman Pangan	4,171,790,746,000	-	(889,487,392,000)	3,282,303,354,000
4	Ditjen Hortikultura	432,638,721,000	-	-	432,638,721,000
5	Ditjen Perkebunan	710,691,049,000	-	-	710,691,049,000
6	Ditjen Peternakan dan Kewan	929,988,457,000	-	-	929,988,457,000
7	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	4,024,245,388,000	419,442,080,000	889,487,392,000	4,913,732,780,000
8	Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	923,431,462,000	-	-	923,431,462,000
9	Badan PPSDM Pertanian	946,911,381,000	-	-	946,911,381,000
10	Badan Karantina Indonesia (BA127)	33,346,902,000	-	-	33,346,902,000
			Total Realokasi (+)	1,308,929,472,000	

Sumber: Usulan *refocusing*/realokasi anggaran TA 2024 untuk pompanisasi Aar sungai peningkatan luas tanam padi (Surat Menteri Pertanian ke Menteri Keuangan Nomor B-38/RC.110/M/03/2024, 13 Maret 2024).

Anggaran *refocusing* sebesar Rp1,31 triliun bersumber dari:

- 1) Internal Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp419,44 miliar dengan rincian: (1) pengurangan alokasi ebanyak 59.300 unit sebesar Rp59,3 miliar; dan (2) pengurangan alokasi *excavator* (BBM, operasional, pengawas alat, mob/demob) sebesar Rp360,14 miliar.
- 2) Eksternal Ditjen Tanaman Pangan sebesar Rp889,49 miliar dengan rincian: (1) pengurangan pupuk hayati pada padi bfortifikasi sebesar Rp39 miliar; (2) pengurangan luasan pengendalian OPT dan DPI 25.000 hektare sebesar Rp25 miliar; (3) pengurangan pupuk hayati pada padi non-rawa sebesar Rp23 miliar; (4)

pengurangan benih jagung reguler seluas 100.000 hektare sebesar Rp90 miliar; (5) pengurangan benih, saprodi (pupuk hayati), dan (6) operasional jagung Upsus seluas 665.000 hektare sebesar Rp712,7 miliar.

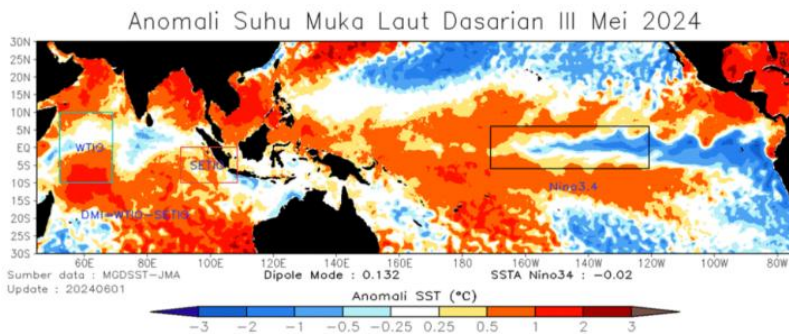
Pergeseran anggaran antar-Eselon I tidak memerlukan persetujuan Komisi IV DPR RI selaku mitra Kementerian Pertanian karena pergeseran anggaran berada dalam satu program yang sama, yaitu Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas. Kegiatan pompanisasi dilaksanakan secara menyeluruh dilaksanakan oleh Ditjen PSP, dan proses usulan revisi selesai dilaksanakan setelah terbitnya DIPA revisi tanggal 19 Maret 2024.

c. *Refocusing* Anggaran untuk Pompanisasi Air Sungai Peningkatan Luas Tanam Padi Rp415 Miliar (Tahap II)

Dampak El Nino ekstrem pada tahun 2023 masih terasa hingga tahun 2024. Hal ini ditandai dengan mundurnya musim tanam akibat rendahnya curah hujan di berbagai wilayah Indonesia, sebagaimana diperkirakan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Kondisi ini mengakibatkan rendahnya ketersediaan air di sentra-sentra produksi padi, sehingga kegiatan tidak berjalan optimal. Akibatnya, luas tanam padi pada periode Oktober 2023 hingga Februari 2024 menurun sekitar 18,71 persen, atau hanya mencapai 5,61 juta hektare. Angka ini jauh di bawah rata-rata periode 2015–2019 yang berada di angka 6,9 juta

hektare. Penurunan ini dikhawatirkan akan mengurangi stok beras nasional dalam beberapa bulan mendatang. Menyikapi tantangan ini, Kementerian Pertanian menetapkan kebijakan strategis berupa perluasan areal tanam (PAT) sebagai langkah percepatan produksi, khususnya untuk komoditas padi dan jagung, guna mengantisipasi dan beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim di sektor pertanian.

Sementara itu, dari data BMKG, prediksi curah hujan bulanan untuk tahun 2024 menunjukkan bahwa pada bulan Mei 2024, provinsi di pulau Jawa dan sebagian Sumatra mulai mengalami curah hujan yang rendah-menengah. Curah hujan rendah akan semakin meluas di bulan Juni-September pada daerah pulau Jawa, NTT, NTB, Bali, Sumatra, sebagian Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.



Gambar 5. Analisis dinamika atmosfer dasarian III Mei 2024

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, 2024

Dengan demikian, jika dilihat dari sebaran curah hujan yang rendah tersebut dan rencana intervensi kegiatan irigasi

perpompaan yang mencakup 34 provinsi di Indonesia, seluruh provinsi yang mengalami curah hujan rendah-menengah berada pada lokasi yang akan menjadi intervensi kegiatan pompanisasi.

Sebagai bagian dari upaya menyukseskan program perluasan areal tanam (PAT), salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah meningkatkan ketersediaan air irigasi. Upaya ini mencakup penyediaan air di lahan sawah beririgasi yang mengalami kekurangan pasokan serta di lahan sawah tadah hujan yang sangat bergantung pada curah hujan musiman. Berdasarkan hasil koordinasi bersama antara Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian, disepakati bahwa Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) akan mendukung 100.605 hektare lahan sawah tadah hujan. Lokasi-lokasi ini telah dilakukan identifikasi bersama sebagai kegiatan pompanisasi yang terdapat sumber air. Pemanfaatan sumber air yang tersedia secara cepat dan praktis dapat dilakukan melalui sistem pompanisasi, yaitu dengan mengalirkan air dari sumber yang ada langsung ke lahan sawah. Metode ini memungkinkan lahan segera diolah dan ditanami, bahkan saat musim kemarau. Jika ketersediaan air terjaga, pompanisasi dapat dilakukan berulang kali, sehingga lahan dapat ditanami padi dua hingga tiga kali dalam setahun.

Menyikapi kondisi ini, Presiden Republik Indonesia memberi arahan kepada Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR pada 13 Februari 2024. Arahan ini menekankan pentingnya pengamanan produksi padi

sebagai bahan pangan pokok nasional. Arahan tersebut disampaikan dengan mempertimbangkan dampak El Nino yang sangat ekstrem pada tahun 2023 dan masih berlanjut hingga Maret 2024. Prediksi BMKG menunjukkan bahwa curah hujan di sejumlah wilayah belum kembali normal. Kondisi ini mengakibatkan ketersediaan air di sentra-sentra produksi padi belum memadai dan menghambat pencapaian target tanam pada periode Oktober 2023 hingga Maret 2024. Kondisi ini dikhawatirkan akan menyebabkan kekurangan ketersediaan beras produksi dalam negeri untuk beberapa bulan. Berikut adalah data realisasi tanam padi dari bulan Oktober 2023 hingga Maret 2024 yang mengalami penurunan sebagai dampak dari El Nino:

Tabel 11. Realisasi tanam periode 2015–2019 dan 2023–2024

Bulan	2015 - 2019 (Ha)	2023 - 2024 (Ha)	Selisih (Ha)
Total	9,017,450	6,030,261	(2,987,189)
Oktober	809,932	533,067	(276,865)
November	1,592,053	856,281	(735,772)
Desember	2,307,511	1,541,122	(766,389)
Januari	1,678,653	1,753,115	74,462
Februari	1,057,493	1,146,676	89,183
Maret	1,571,808	200,000	(1,371,808)

Sumber: BPS, 2024

Berdasarkan data tersebut menunjukan bahwa terdapat penurunan luas tanam padi pada periode 2023–2024 sebesar 33,13% dibandingkan dengan rerata luas tanam padi pada periode 2015–2019. Hal ini terutama disebabkan terjadinya penurunan ketersediaan air untuk penanaman padi sebagai dampak dari El Nino yang terjadi mulai dari tahun 2023.

Di samping dampak perubahan iklim, sektor pertanian juga menghadapi berbagai tantangan lain yang turut berkontribusi terhadap potensi kelangkaan pangan. Beberapa di antaranya, yaitu tekanan kondisi perekonomian global, seperti melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang berdampak pada meningkatnya biaya produksi. Gejolak ekonomi dunia juga menyebabkan fluktuasi harga pangan sehingga hasil panen menjadi lebih mahal. Selain itu, bencana alam kerap mengganggu produksi dan distribusi pangan. Pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat memperbesar tekanan terhadap kebutuhan pangan nasional. Sementara itu, tantangan distribusi turut dipengaruhi oleh karakteristik geografis Indonesia yang membuat proses penyaluran pangan menjadi lebih lama dan kompleks. Tak kalah penting, alih fungsi lahan pertanian sepanjang tahun 2002 sampai 2008 yang terus terjadi dengan laju rata-rata sekitar 100.000–110.000 hektare per tahun (Irawan dalam Handoyo, 2010), juga menjadi ancaman serius terhadap keberlanjutan produksi pangan nasional.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai upaya untuk peningkatan produksi padi 2024, di antaranya melalui kegiatan optimasi lahan rawa seluas 400.000 hektare dan kegiatan pompanisasi pada daerah sawah tadah hujan yang memiliki potensi sumber air, seperti sungai mata air dan drainase yang dapat dimanfaatkan. Oleh karena itu, pada *refocusing* anggaran, Ditjen PSP mengusulkan kembali program pompanisasi. Pompanisasi dilakukan sebagai

upaya peningkatan ketersediaan air untuk irigasi di wilayah yang masih memiliki potensi sumber daya air guna penanganan dampak El Nino dan peningkatan produktivitas sektor pertanian. Sebagai bentuk koordinasi dengan Kementerian PUPR, telah dilakukan identifikasi bersama dan sinkronisasi untuk menyepakati bahwa terdapat 100.605 hektare lahan sawah tadah hujan yang akan menjadi fokus intervensi untuk mendukung peningkatan produksi padi.

Untuk melakukan perluasan areal tanam, Kementerian Pertanian mengoptimalkan bantuan pompa air kepada kelompok tani di seluruh Indonesia yang berjumlah 27.548 unit (pengadaan 2019–2023). Jumlah pompa tersebut hanya mampu melayani irigasi seluas 275.480 hektare, sehingga dari lahan tadah hujan yang potensial membutuhkan tambahan pompanisasi. Selanjutnya, melalui *refocusing* tahap II diusulkan pengadaan pompa air sebanyak 4.825 unit, irigasi perpompaan sebanyak 1.754 unit, dan kegiatan irigasi lainnya sebanyak 120 unit. Dari keseluruhan kegiatan tersebut diharapkan akan terdapat penambahan luas areal tanam (PAT) seluas 100.605 hektare.

Dalam rangka pelaksanaan perluasan areal tanam (PAT), melalui dukungan pompanisasi telah dilaksanakan koordinasi antara Ditjen Sumber Daya Air dengan Kementerian PUPR pada tanggal 14 Maret 2024. Dari koordinasi tersebut disepakati bahwa dalam rangka pemenuhan target tambahan luas tanam dari lahan tadah hujan seluas satu juta hektare, telah dilaksanakan survei bersama BBWS/BWS, Dinas PUPR Provinsi/Kabupaten Kota, dan Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota pada

tanggal 15–22 Maret 2024. Survei dilakukan pada lahan-lahan tadah hujan yang diusulkan untuk penentuan titik lokasi pengambilan air serta verifikasi ketersediaan air.

Tabel 12. Analisis penambahan luas areal tanam

No	Bulan	Volume (Unit)	Layanan/Unit (Ha)	Jumlah Layanan
	Total			145.605
1	Pompa Kecil (3 inch)	2.225	5	11.125
2	Pompa Sedang (4 inch & 6 inch)	2.600	20	52.000
3	Pompa Besar (8 inch + rumah)	1.754	20	35.080
4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier	600	75	45.000
5	Bangunan Konservasi dan Antisipasi Anomali Iklim	120	20	2.400

Sumber: Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, 2024.

Sebelumnya, melalui surat Nomor: B38/RC.110/M/03/2024 tanggal 13 Maret 2024 telah mengusulkan *refocusing*/realokasi anggaran TA 2024 sebesar Rp1,3 triliun untuk pompanisasi air sungai untuk peningkatan luas tanam padi kepada Menteri Keuangan, dan telah diproses dengan terbitnya DIPA Revisi Kementerian Pertanian TA 2024 tanggal 19 Maret 2024. Selanjutnya, berdasarkan perhitungan potensi lahan sawah tadah hujan yang dapat diintervensi dengan irigasi perpompaan, masih diperlukan tambahan penyediaan pompanisasi, termasuk irigasi pertanian dan alat mesin pertanian untuk peningkatan luas tanam padi tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Pertanian kembali mengusulkan *refocusing* program/kegiatan dan anggaran Kementerian Pertanian TA 2024 sebesar Rp415,3 miliar sebagai berikut:

Tabel 13. Perubahan tambahan *refocusing* TA 2024 untuk Pompanisasi

NO	RINCIAN KEGIATAN / ITEM	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	ANGGARAN (Rp)
	TOTAL			415,264,400,000
1	Pompanisasi dan Pemanfaatan Sumber Air Lainnya:	6,579 Unit		318,817,500,000
	- Pompa Kecil (3")	2,225 Unit	12,700,000	28,257,500,000
	- Pompa Sedang (4" & 6")	2,600 Unit	30,800,000	80,080,000,000
	- Pompa Besar (8,5") / Irigasi Perpompaan	1,754 Unit	120,000,000	210,480,000,000
2	Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim	120 Unit	120,000,000	14,400,000,000
3	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT)	600 Unit	75,000,000	45,000,000,000
4	Hand Sprayer	20,000 Unit	1,000,000	20,000,000,000
5	Operasional Pelaksanaan Kegiatan	1 Paket	17,046,900,000	17,046,900,000

Sumber: Usulan *refocusing*/realokasi dan Revisi Anggaran TA 2024 (Surat Menteri Pertanian ke Menteri Keuangan Nomor B-55/RC.110/M/04/2024, 01 April 2024)

Total anggaran yang di-*refocusing* adalah sebesar Rp415,3 miliar yang bersumber dari anggaran Ditjen TP dan Ditjen PSP sebagaimana diuraikan pada Tabel 14.

Tabel 14. Total *refocusing* per Eselon I TA 2024 untuk Pompanisasi

NO	ESELON I / UNIT KERJA	PAGU SEMULA (Rp)	REALOKASI (Rp)		PAGU MENJADI (Rp)
			INTERNAL	EKSTERNAL	
	TOTAL	13.563.435.046.000			13.563.435.046.000
1	Sekretariat Jenderal	1.266.153.412.000	-	-	1.266.153.412.000
2	Inspektorat Jenderal	124.237.528.000	-	-	124.237.528.000
3	Ditjen Tanaman Pangan	3.282.303.354.000	-	(400.005.000.000)	2.882.298.354.000
4	Ditjen Hortikultura	432.638.721.000	-	-	432.638.721.000
5	Ditjen Perkebunan	710.691.049.000	-	-	710.691.049.000
6	Ditjen Peternakan dan Kewan	929.988.457.000	-	-	929.988.457.000
7	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	4.913.732.780.000	15.259.400.000	400.005.000.000	5.313.737.780.000
8	Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	923.431.462.000	-	-	923.431.462.000
9	Badan PPSDM Pertanian	946.911.381.000	-	-	946.911.381.000
10	Badan Karantina Indonesia (BA127)	33.346.902.000	-	-	33.346.902.000
			Total Realokasi (+)	415.264.400.000	

Sumber: Usulan *refocusing*/realokasi dan revisi anggaran TA 2024 (Surat Menteri Pertanian ke Menteri Keuangan Nomor B-55/RC.110/M/04/2024, 01 April 2024)

Realokasi anggaran *refocusing* tahap II berakibat pada pengurangan volume output penyaluran benih jagung seluas 444.450 hektare dari semula seluas 1.235.000 hektare menjadi seluas 790.550 hektare. Berdasarkan data kerangka sampel area (KSA) yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), total luas panen jagung selama periode Januari hingga April 2024 tercatat sebesar 956.101 hektare. Angka ini menunjukkan peningkatan 10,36% dibandingkan periode yang sama di tahun 2023, mencerminkan tren positif dalam upaya peningkatan produksi nasional.

Produksi jagung KA 14% bulan Maret 2024 mencapai 2.290.981 ton, April 1.758.314 ton, sehingga total produksi Maret–April 2024 mencapai 4.049.295 ton. Angka tersebut lebih tinggi dari perkiraan kebutuhan jagung pipil di bulan Maret dan April 2024 sebesar 2.639.487 ton dan akan terjadi surplus sebesar 1.409.808 ton. Saat ini, harga rata-rata jagung di tingkat petani pada Minggu ke-1 Maret 2024 refraksi KA 14% sebesar Rp5.572/kg. Namun, sudah terdapat 35 lokasi di mana harga jagung di bawah HAP (Rp4.200/kg). Hal ini menunjukkan bahwa *supply* dan stok jagung yang beredar di masyarakat cukup melimpah atau berlebih. Atas pertimbangan tersebut dan untuk mendukung pengamanan dan penyediaan pangan pokok beras di tahun 2024, alokasi penyaluran bantuan benih jagung dialihkan untuk mendukung kegiatan pompanisasi untuk percepatan tanam padi dan pengamanan *standing crop*.

Proyeksi neraca jagung periode Januari–Desember 2024 dari Badan Pangan Nasional menunjukkan bahwa dengan kondisi stok awal tahun 2024, yaitu 3,51 juta pipilan

kering (PK) diperkirakan ketersediaan produksi jagung akan mencapai 20,35 juta PK pada akhir tahun 2024. Kondisi ketersediaan tersebut masih memperhitungkan peluang importasi jagung sebesar 1,96 juta ton, jumlah tercecer sebesar 719 ribu ton, produksi bersih mencapai 14,85 juta ton dengan sasaran produksi jagung KA 14% tahun 2024 sebesar 15,57 juta ton. Berdasarkan kondisi tersebut, sesuai proyeksi neraca jagung per 22 Maret 2024, dengan kebutuhan mencapai 14,38 juta ton PK, maka akan terdapat surplus akhir tahun atau stok awal tahun 2025 sebesar 5,96 juta PK. Peningkatan surplus produksi 2024 dibandingkan neraca jagung per 21 Februari 2024 disebabkan meningkatnya perkiraan produksi jagung di bulan Maret–April 2024 sebesar 4.049.295 ton (BPS, 2024).

d. Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk Pompanisasi Mendukung Peningkatan Produksi Padi 2024

Merujuk pada hasil koordinasi dengan KemenPUPR telah ditetapkan bahwa dari total luas lahan baku sawah (LBS) seluas 7.463.948 hektare, hasil identifikasi dan inventarisasi lapangan oleh Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) terdapat areal sawah tadah hujan seluas 3.055.487 hektare. Dari luasan tersebut, yang berpotensi dioptimalkan melalui dukungan pompanisasi seluas 2.154.291 hektare, dengan luas yang sudah terlayani pompanisasi seluas 208.244 hektare, sehingga masih terdapat potensi lahan seluas 1.946.047 hektare.

Atas potensi lahan tersebut, Ditjen PSP telah melakukan *refocusing* anggaran untuk pompanisasi yang telah disetujui oleh DJA dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 15. *Refocusing* kegiatan Pompanisasi TA 2024

Kegiatan	Jumlah Unit	Luas Layanan (Ha)
Total Intervensi Refocusing		579,455
Refocusing 1		6,250
- Pompa Air	1,25	6,250
Refocusing 2		472,600
- Irigasi Perpompaan	3,634	72,680
- Pompa Air	19,696	393,920
- Bangunan Konservasi Air dan Anomali Iklim	300	6,000
Refocusing 3		100,605
- Irigasi Perpompaan	1,754	35,080
- Pompa Air Kecil	2,225	11,125
- Pompa Air Sedang	2,6	52,000
- Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim	120	2,400

Sumber: Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, 2024

Dengan intervensi *refocusing* yang telah dilakukan Ditjen PSP, maka masih terdapat potensi sawah tadah hujan yang masih dapat dioptimalkan untuk penambahan areal tanam. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, Dinas lingkup Pertanian provinsi dan kabupaten serta dinas yang membidangi pengairan provinsi dan kabupaten berupaya melakukan langkah cepat untuk melakukan identifikasi dan verifikasi lokasi sawah tadah hujan yang masih berpotensi dalam peningkatan produksi padi tahun 2024. Upaya ini juga dilakukan dengan memanfaatkan potensi air yang masih ada melalui pompanisasi dan pemanfaatan sumber air lainnya.

Tabel 16. Usulan ABT Kementerian Pertanian TA 2024

No	Item Kegiatan	Volume		Luas Layanan (Ha)	Anggaran (Rp000)
1	Pompanisasi dan Pemanfaatan Sumber Air	83.138	Unit	1.136.404	4.180.839.000
	- Pompa Kecil (3")	35.170	Unit	175.853	446.659.000
	- Pompa Sedang (4" & 6")	20.600	Unit	413.191	634.480.000
	- Irigasi Perpompaaan	17.145	Unit	342.908	2.057.400.000
	- Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim	1.000	Unit	20.000	120.000.000
	- Irigasi Perpipaaran	9.223	Unit	184.453	922.300.000
2	Traktor Roda 2	5.883	Unit	-	188.256.000
3	Traktor Roda 4	2.484	Unit	-	943.920.000
4	Operasional Pelaksanaan Kegiatan	1	Paket	-	181.809.000
5	Pengawasan dan Pendampingan Pompanisasi *)	1	Paket	-	306.287.000
	Total Usulan				5.801.111.000

Sumber: Usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk Pompanisasi Peningkatan Produksi Padi TA 2024 (Surat Menteri Pertanian ke Menteri Keuangan Nomor B-53/RC.110/M/04/2024, 01 April 2024)

Sehubungan dengan kondisi yang dijelaskan di atas, dari hasil identifikasi dan verifikasi bersama, Kementerian Pertanian mengusulkan anggaran belanja tambahan (ABT) TA 2024 dengan luas potensi sawah tadah hujan yang akan diintervensi sebesar 1.136.404 hektare.

Kementerian Pertanian mengajukan usulan anggaran belanja tambahan (ABT) untuk kegiatan pompanisasi.

Usulan tersebut disampaikan kepada Kementerian Keuangan melalui surat Nomor B-80/RC.110/M/05/2024 tertanggal 6 Mei 2024. Usulan ini lengkap dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan sesuai ketentuan Pasal 118 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Menindaklanjuti pengajuan tersebut, selanjutnya dilakukan proses penelaahan dan kajian atas usulan penggunaan anggaran belanja lainnya dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) oleh Kementerian Pertanian, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembahasan (BAP) Nomor BAP-24/AG.312/2024. Proses ini dilaksanakan melalui rapat daring pada 15 Mei 2024. Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai pihak terkait, antara lain Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, serta Bagian Anggaran BUN sebagai unit pendukung dan mitra PPA BUN BA 999.08, bersama dengan perwakilan dari Kementerian Pertanian, yaitu Biro Perencanaan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP), serta Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP).

Setelah proses penelaahan selesai dilakukan, Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) serta Belanja Umum Negara (BUN), atas nama Direktur Jenderal Anggaran, menyampaikan surat Nomor S-227/AG/AG.5/2024 tertanggal 12 Juni 2024. Surat tersebut berisi permintaan

kelengkapan dokumen pendukung untuk penerbitan Surat Penyediaan Anggaran Bagian Anggaran (SP SABA), terkait pengalihan anggaran dari BA BUN Belanja Lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran Kementerian Pertanian (BA 018) guna mendanai tambahan anggaran untuk kegiatan pompanisasi peningkatan produksi padi tahun anggaran 2024. Bersamaan dengan itu, juga disampaikan rekapitulasi persetujuan Menteri Keuangan atas pengalihan anggaran dimaksud dengan nilai sebesar Rp1.742.369.900.000,00, lengkap dengan rincian alokasinya.

Tabel 17. Pergeseran dari BA-BUN belanja lainnya ke BA Kementerian Pertanian (BA 018) TA 2024

No	Kegiatan	Usulan (Rp)	Persetujuan (Rp)
	Total	5,801,111,000,000	1,742,369,900,000
1	Fasilitasi Bantuan untuk Pompanisasi pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	4,347,356,750,000	1,742,369,900,000
2	Fasilitasi Bantuan untuk Alsintan Olah Tanah pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	1,147,467,250,000	-
3	Pengawasan dan Pendampingan pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	306,287,000,000	-

Sumber: Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP SABA) terhadap Usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk Pompanisasi Peningkatan Produksi Padi TA 2024 (Surat Dirjen Anggaran a.n. Menteri Keuangan ke Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor S-113/MK.2/2024, 20 Juni 2024).

Setelah penyampaian dokumen pendukung usulan penerbitan SP SABA, sebagaimana tercantum dalam surat Inspektur Jenderal Nomor: B-1897/RC.110/G/06/2024 tanggal 13 Juni 2024 perihal pengajuan tambahan anggaran untuk program pompanisasi peningkatan produksi padi tahun anggaran 2024, dari Bagian Anggaran Belanja Lainnya Bendahara Umum Negara (BA 999.08) ke Bagian Anggaran Kementerian Pertanian (BA 018), akhirnya diterbitkan Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP SABA). Penetapan ini dikukuhkan melalui surat Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan Nomor: S-113/MK.2/2024 tanggal 20 Juni 2024, yang secara resmi menyetujui alokasi tambahan anggaran tersebut untuk mendukung peningkatan produksi padi melalui program pompanisasi.

Tabel 18. Tambahan anggaran dari BA-BUN per unit organisasi dan per program TA 2024

Kode	KL / UO / Program / RO	Jumlah (Rp)
018	Total	1,742,369,900,000
018.08	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	1,742,369,900,000
018.08.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1,742,369,900,000

Sumber: Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP SABA) terhadap Usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk Pompanisasi Peningkatan Produksi Padi TA 2024 (Surat Dirjen Anggaran a.n. Menteri Keuangan ke Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor S-113/MK.2/2024, 20 Juni 2024).

Tabel 19. Rincian kegiatan persetujuan sesuai SP SABA TA 2024

No	Kegiatan	Volume		Luas Layanan (Ha)	Harga Satuan (Rp)	Anggaran (Rp)
	Total			541,205	263,500,000	1,742,369,900,000
1	Pompanisasi :	46,558	Unit	541,205	263,500,000	1,742,369,900,000
a	Pompa Kecil (3 inch)	25,997	Unit	129,985	12,700,000	330,161,900,000
b	Pompa Sedang (4 inch & 6 inch)	10,610	Unit	212,200	30,800,000	326,788,000,000
c	Irigasi Perpompaaan	4,516	Unit	90,320	120,000,000	541,920,000,000
d	Irigasi Perpipaan	5,435	Unit	108,700	100,000,000	543,500,000,000

Sumber: Lampiran Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP SABA) terhadap Usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk Pompanisasi Peningkatan Produksi Padi TA 2024.

e. *Refocusing* untuk Pemenuhan Kebutuhan Benih Padi dan Sarana Pendukungnya

Upaya pemenuhan penyediaan pangan melalui peningkatan produksi oleh Kementerian Pertanian terus dilakukan di tengah ancaman krisis pangan global dan iklim ekstrem. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kementerian Pertanian yang mulai dari awal tahun 2024, mulai dari *refocusing* Upsus peningkatan produksi padi dan jagung, optimasi lahan rawa, pompanisasi, dan lainnya.

Berdasarkan perkembangan di lapangan, pelaksanaan optimasi lahan rawa mineral seluas 400.000 hektare mengalami beberapa kendala berupa permasalahan di daerah. Akibatnya, target tersebut tidak dapat terealisasi sebagaimana yang direncanakan. Mengingat belum terlokasinya anggaran benih khususnya komoditas padi, baik untuk lahan hasil optimasi lahan rawa maupun kegiatan pompanisasi, Kementerian Pertanian akan melakukan *refocusing* kembali anggaran TA 2024 yang akan diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan, antara lain benih

padi, saprodi benih padi, alat dan mesin pertanian prapanen dan pascapanen, serta kebutuhan strategis lainnya, untuk percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran pembangunan pertanian TA 2024.

Refocusing anggaran dilakukan untuk mendukung sejumlah kegiatan prioritas, antara lain penyediaan benih padi, penyediaan sarana produksi padi (saprodi), pengadaan alat dan mesin pertanian untuk kegiatan prapanen dan pascapanen, serta berbagai program strategis lainnya di sektor pertanian. Program strategis tersebut mencakup optimasi lahan sebagai respons terhadap bencana alam di Sumatra Barat, *monitoring* pengelolaan air terpadu (PAT), reviu kebijakan pupuk bersubsidi sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pelaksanaan asuransi usaha tani padi (AUTP), fasilitasi kredit usaha alat dan mesin pertanian (KUA), kegiatan *monitoring* dan evaluasi, serta pemberian honorarium bagi pengelola keuangan. Adapun sumber pendanaan *refocusing* ini berasal dari tiga komponen utama, yaitu program optimasi lahan rawa mineral seluas 40.000 hektare, sisa anggaran pengadaan benih reguler, serta hasil optimalisasi pengadaan alat dan mesin pertanian prapanen.

Berdasarkan hasil penelaahan, secara umum usulan Kementerian Pertanian dapat disetujui dengan perbaikan terhadap beberapa data/dokumen pendukung sesuai yang disarankan serta batas waktu yang telah ditetapkan, dan DIPA revisi terbit pada tanggal 19 Juli 2024.

Tabel 20. *Refocusing* untuk pemenuhan kebutuhan benih padi dan sarana pendukungnya TA 2024

NO	ESELON I / KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN	ANGGARAN (Rp)
	TOTAL REFOCUSING			483,682,180,000
I	DITJEN TANAMAN PANGAN			407,397,073,000
1	Penyediaan Benih:			262,560,512,340
-	Benih Padi mendukung Oplah Rawa	189,391 Ha	340,000	64,392,940,000
-	Benih Padi mendukung ABT Pompanisasi	541,202 Ha	340,000	184,008,680,000
-	Operasional Kegiatan Benih mendukung Oplah dan ABT Pompanisasi	1 Paket	14,158,892,340	14,158,892,340
2	Penyediaan Saprodi:			133,976,800,660
-	Saprodi Padi mendukung Oplah Rawa	189,391 Ha	175,000	33,143,425,000
-	Saprodi Padi mendukung ABT Pompanisasi	541,202 Ha	175,000	94,710,350,000
-	Operasional Kegiatan Saprodi Oplah dan ABT Pompanisasi	1 Paket	6,123,025,660	6,123,025,660
3	Monitoring PAT Padi	1 Paket	2,500,000,000	2,500,000,000
4	Alsintan Pascapanen:			8,359,760,000
-	Vertical Dryer Non Stainless Steel Kap 10 Ton	7 Unit	1,118,000,000	7,826,000,000
-	Operasional Alsintan Pascapanen (Vertical Dryer Non Stainless Steel)	1 Paket	533,760,000	533,760,000
II	DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN			76,285,107,000
1	Oplah Penanganan Bencana Sumatera Barat	1,890 Ha	5,411,800	10,228,302,000
2	Operasional Oplah Sumatera Barat	1 Paket	511,413,000	511,413,000
3	Traktor Roda 4	48 Unit	358,491,000	17,207,568,000
4	Traktor Roda 2	782 Unit	32,000,000	25,024,000,000
5	Rice Transplanter	56 Unit	91,000,000	5,096,000,000
5	Movev dan Pengelola Keuangan Kegiatan	1 Paket	10,232,548,000	10,232,548,000
6	Reviu Pupuk Bersubsidi (Rekomendasi BPK)	1 Paket	2,799,876,000	2,799,876,000
7	Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	30,000 Ha	144,000	4,320,000,000
8	Operasional AUTP	1 Paket	302,400,000	302,400,000
9	Fasilitasi Kredit Usaha Alsintan (KUA)	1 Paket	563,000,000	563,000,000
NO	ESELON I	PAGU SEMULA (Rp)	REALOKASI (Rp)	PAGU MENJADI (Rp)
			INTERNAL	EKSTERNAL
TOTAL		15,517,449,694,000	157,532,027,000	15,517,449,694,000
1	Sekretariat Jenderal	1,266,153,412,000	-	1,266,153,412,000
2	Inspektorat Jenderal	124,237,528,000	-	124,237,528,000
3	Ditjen Tanaman Pangan	2,882,298,354,000	81,246,920,000	3,208,448,507,000
4	Ditjen Hortikultura	432,638,721,000	-	432,638,721,000
5	Ditjen Perkebunan	712,691,049,000	-	712,691,049,000
6	Ditjen Peternakan dan Kewan	957,035,379,000	-	957,035,379,000
7	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	7,056,107,680,000	76,285,107,000	6,729,957,527,000
8	Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	924,171,799,000	-	924,171,799,000
9	Badan PPSDM Pertanian	1,128,768,870,000	-	1,128,768,870,000
10	Badan Karantina Indonesia (BA127)	33,346,902,000	-	33,346,902,000
			Total Realokasi (+)	483,682,180,000

Sumber: Lampiran usulan Revisi Penggunaan Anggaran Peningkatan Produksi Padi dan Jagung TA 2024 (Surat Menteri Pertanian ke Menteri Keuangan Nomor B-115/RC.110/M/07/2024, 12 Juli 2024).

f. *Refocusing* Anggaran Pemanfaatan Belanja Pegawai Operasional 001 dan Optimalisasi Sisa Kontrak TA 2024

Dari berbagai upaya yang telah dilakukan tersebut serta untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sampai dengan akhir tahun 2024, masih dibutuhkan tambahan benih dan sarana pendukungnya yang diusulkan pemenuhannya sebesar Rp151.430.120.000,00 melalui optimalisasi sisa kontrak kegiatan sebesar Rp148.430.120.000,00 dan optimalisasi belanja pegawai operasional (001) sebesar Rp3.000.000.000,00. Selain itu, untuk membiayai kegiatan strategis lainnya sebesar Rp77.262.479.000,00 diusulkan untuk dipenuhi melalui optimalisasi belanja pegawai operasional (001) TA 2024.

Eselon I lingkup Kementerian Pertanian mengajukan usulan secara mandiri dilengkapi dengan dokumen dan pendukung yang memadai dan telah direviu oleh Tim APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Penelaahan usulan revisi anggaran dibagi menjadi dua waktu, yaitu 1) penelaahan usulan revisi berkaitan dengan anggaran Belanja Pegawai Operasional (001) pada tanggal 30 Agustus 2024; dan 2) penelaahan usulan revisi anggaran berkaitan dengan optimalisasi sisa kontrak pada tanggal 2 September 2024.

Tabel 21. *Refocusing* anggaran (pemanfaatan belanja pegawai operasional 001 dan optimalisasi sisa kontrak TA 2024)

NO	ESELON I / KEGIATAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp000)	ANGGARAN (Rp000)
	TOTAL OPTIMALISASI			151.430.120.000
I	DITJEN TANAMAN PANGAN			93.330.000.000
1	Penyediaan Benih Padi:			19.000.000.000
a	Benih Padi	34,600 Ha	515,000	17.819.000.000
b	Operasional Pelaksanaan Penyediaan Benih Padi	1 Paket	-	1.181.000.000
2	Penyediaan Benih Jagung:			74.330.000.000
a	Benih Jagung	65,200 Ha	1,075,000	70.090.000.000
b	Operasional Pelaksanaan Penyediaan Benih Jagung	1 Paket	-	4.240.000.000
II	DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN			58.100.120.000
1	Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian Prapenen:			53.602.200.000
a	Traktor Roda 4	50 Unit	380.000.000	19.000.000.000
b	Traktor Roda 2	781 Unit	32.000.000	24.992.000.000
c	Rice Transplanter	100 Unit	91.000.000	9.100.000.000
d	Operasional Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Alsintan Prapenen	1 Paket	-	510.200.000
2	Operasional Mendukung Pompanisasi dan Optimasi Lahan	1 Paket	3.080.000.000	3.080.000.000
3	Verifikasi dan Validasi Potensi Lahan Cetak Sawah 50rb Ha	1 Paket	1.417.920.000	1.417.920.000

NO	ESELON I	PAGU SEMULA (Rp000)	USULAN REALOKASI (Rp000)						PAGU MENJAD (Rp000)
			BENIH DAN SARANA PENDUKUNGNYA		KEGIATAN STRATEGIS LAINNYA				
			OPTIMALISASI SISA KONTRAK		BELANJA PEGAWAI (001)		BELANJA PEGAWAI (001)		
			INTERNAL	EKSTERNAL	INTERNAL	INTERNAL	EKSTERNAL		
	TOTAL	15.578.313.727	76.430.120	-	3.000.000	46.786.881	-	-	15.578.313.727
1	SETJEN	1.268.361.497	-	-	-	19.553.116	(30.475.598)	-	1.237.885.899
2	ITJEN	124.237.528	-	-	-	1.000.000	787.148	-	125.024.676
3	DITJEN TP	3.208.448.507	18.330.000	72.000.000	3.000.000	9.000.000	-	-	3.280.448.507
4	DITJEN HORTI	432.638.721	-	-	-	-	861.050	-	433.499.771
5	DITJEN BUN	712.691.049	-	-	-	3.000.000	-	-	712.691.049
6	DITJEN PKH	957.556.673	-	-	-	3.233.765	28.827.400	-	986.384.073
7	DITJEN PSP	6.729.957.527	58.100.120	(72.000.000)	-	-	-	-	6.657.957.527
8	BSIP	924.171.799	-	-	-	11.000.000	-	-	924.171.799
9	BPPSDMP	1.186.903.524	-	-	-	-	-	-	1.186.903.524
10	BARANTAN	33.346.902	-	-	-	-	-	-	33.346.902

Sumber: Lampiran usulan revisi optimalisasi anggaran TA 2024 (Surat Menteri Pertanian ke Menteri Keuangan Nomor B-155/RC.110/M/08/2024, 28 Agustus 2024).

Berdasarkan hasil *refocusing*, total anggaran *refocusing* Kementerian Pertanian untuk kegiatan upaya khusus peningkatan produksi padi jagung, optimasi lahan rawa, pompanisasi serta lainnya menjadi sebesar Rp12,13 triliun. Jumlah anggaran *refocusing* ini mencapai 80% total pagu Kementerian Pertanian TA 2024. Besarnya anggaran *refocusing* ini diharapkan kebutuhan benih padi baik pada

lahan reguler, optimasi lahan rawa, serta lahan sawah tadah hujan yang diintervensi pompanisasi dapat terpenuhi sampai dengan Desember 2024.

Selain itu, mengingat bahwa jumlah anggaran *refocusing* yang cukup besar didukung dengan langkah-langkah percepatan/akselerasi untuk menjaga pencapaian target, baik terkait komoditas maupun transfer/penyaluran bantuan ke petani, dengan tetap mengedepankan azas akuntabilitas, standar dan operasional prosedur, serta sesuai dengan peraturan perundangan.

g. Optimalisasi Anggaran Kementerian Pertanian TA 2024

Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Republik Indonesia dalam berbagai kesempatan bahwa salah satu program prioritas Kabinet Merah Putih adalah mewujudkan swasembada pangan. Untuk itu, upaya peningkatan produksi dalam negeri dilakukan Kementerian Pertanian, salah satunya melalui optimasi lahan (Oplah) rawa. Pada tahun 2025, Kementerian Pertanian akan melakukan oplah rawa seluas 350 ribu hektare. Untuk mempercepat kegiatan dimaksud agar dapat dilakukan pada awal tahun 2025, maka sebagian survei investigasi desain (SID) sebaiknya dilakukan pada akhir tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Pertanian akan melakukan optimalisasi anggaran dengan meminta rekomendasi dan persetujuan Menteri Keuangan berkenaan dengan batas waktu penyampaian usulan revisi anggaran sesuai ketentuan peraturan perundangan, untuk

mendukung kegiatan survei investigasi desain tersebut melalui optimalisasi anggaran internal Kementerian Pertanian TA 2024.

Kementerian Pertanian berupaya terus untuk meningkatkan produksi dalam negeri sebagai tindak lanjut arahan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk mewujudkan swasembada pangan, salah satunya melalui optimasi lahan rawa. Kementerian Pertanian melalui Ditjen PSP melakukan optimasi lahan rawa seluas 500 ribu hektare melalui *refocusing*/relokasi anggaran internal Kementerian Pertanian TA 2025. Mengingat kegiatan optimasi lahan rawa harus didukung dengan survei investigasi desain (SID) sehingga dilakukan revisi optimalisasi anggaran TA 2024 untuk pengerjaan sebagian SID seluas 100 ribu hektare senilai Rp26.500.000.000. Selanjutnya, Menteri Keuangan menanggapi hal tersebut tersebut dan menyatakan usulan tersebut dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 22. Usulan Survei Investigasi Desain (SID) TA 2024

NO	UNIT ESELON I / KEGIATAN	KEBUTUHAN			
		VOL.		UNIT COST (Rp)	ANGGARAN (Rp)
	TOTAL				26.500.000.000
	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian				26.500.000.000
1	Survei Investigasi Desain (SID)	Hektare	100.000	250.000	25.000.000.000
2	Operasional Pelaksanaan Kegiatan	Paket	1	1.500.000.000	1.500.000.000

Sumber: Usulan Revisi Optimalisasi Anggaran Kementerian Pertanian TA 2024 (Surat Menteri Pertanian ke Menteri Keuangan Nomor B-219/RC.110/M/11/2024, 15 November 2024).

Proses optimalisasi anggaran Kementerian Pertanian TA 2024 untuk SID 100.000 optimasi lahan rawa TA 2025 telah terlaksana dengan terbitnya DIPA Revisi Kementerian Pertanian pada tanggal 4 Desember 2024. Selanjutnya, berdasarkan *time line* pelaksanaan kegiatan dan anggaran TA 2024 yang sudah mendekati akhir TA 2024, diharapkan agar Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian selaku pelaksana kegiatan dapat melakukan akselerasi percepatan pelaksanaannya di lapangan, serta melaporkan progres pelaksanaannya secara rutin.

B. Reprioritasi Program Kementerian Pertanian Tahun 2024

Pembangunan pertanian harus dilaksanakan dengan cermat dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global. Tantangan utamanya adalah perubahan iklim ekstrem, seperti kekeringan akibat El Nino. Selain itu, pembangunan pertanian juga memiliki tugas krusial untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dan berperan sebagai penyedia pangan bagi masyarakat dunia dalam jangka panjang. Untuk mencapai tujuan tersebut, Kementerian Pertanian telah menyusun serangkaian langkah strategis yang terukur dan terencana untuk mengakselerasi produksi komoditas pangan dan komoditas utama.

Di tengah era ketidakpastian dan berkembangnya tantangan, ketahanan pangan menjadi pilar utama bagi kestabilan dan kelangsungan hidup bangsa. Kementerian

Pertanian menyadari urgensi strategi yang kuat dan inovatif, untuk itu, solusi proaktif diperlukan untuk mengantisipasi potensi krisis pangan global.

Rencana aksi yang disusun mencakup berbagai aspek strategis dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian. Langkah-langkah tersebut, antara lain optimalisasi pemanfaatan lahan rawa mineral dan lahan tadah hujan, peningkatan indeks pertanaman (IP), serta perluasan areal tanam (PAT). Selain itu, program optimasi lahan (Oplah) didukung oleh pemenuhan kebutuhan sarana produksi, seperti pupuk, benih, dan alat mesin pertanian (alsintan). Untuk menunjang keberlanjutan program, disertakan pula kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya bagi petani, penyuluh, dan pelaksana standar instrumen pertanian di lapangan.

1. Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dan Areal Tanam

Dalam rangka mengantisipasi potensi krisis pangan global, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan telah melakukan upaya khusus melalui percepatan tanam komoditas strategis, yakni padi dan jagung. Langkah ini terbagi ke dalam dua fokus utama, yaitu peningkatan produksi jagung dan peningkatan produksi padi.

Untuk jagung, strategi diarahkan pada pemanfaatan benih jagung hibrida yang memiliki produktivitas tinggi serta ketahanan terhadap berbagai kondisi iklim. Penggunaan benih unggul ini diharapkan dapat meningkatkan hasil panen dan mendukung ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.

Dalam rangka meningkatkan produksi padi, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menitikberatkan strategi pada pengembangan kawasan padi biofortifikasi serta penyediaan sarana produksi yang mendukung peningkatan produktivitas secara signifikan. Fokus utama diarahkan pada ketersediaan pupuk dan pestisida, yang berperan penting dalam menunjang pertumbuhan tanaman sekaligus menekan risiko serangan hama dan penyakit. Program ini secara khusus menyasar wilayah-wilayah baru yang sebelumnya belum terjangkau oleh program fasilitasi lain, dengan tujuan agar peningkatan produktivitas dapat berlangsung secara merata dan menjangkau lebih luas, sehingga berdampak positif terhadap produksi padi nasional.

Selain program utama tersebut, strategi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan juga mencakup berbagai kegiatan pendukung yang dinilai krusial dalam percepatan tanam untuk peningkatan produksi padi dan jagung. Salah satu komponen penting dalam kegiatan ini adalah penangkaran benih padi, yang bertujuan menjamin ketersediaan benih unggul untuk musim tanam berikutnya. Penyediaan benih berkualitas ini dipandang sebagai langkah strategis untuk membantu petani mencapai hasil panen yang optimal.

Selain itu, upaya Direktorat Jenderal Tanaman Pangan juga mencakup kegiatan penyediaan sarana pascapanen. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk mengurangi kehilangan hasil dari proses panen dan meningkatkan efisiensi waktu panen. Dengan demikian, langkah ini tidak hanya mendukung percepatan tanam, tetapi juga membantu

meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan rantai pasok pangan.

Dalam konteks pengendalian hama dan penyakit serta penanganan dampak perubahan iklim (DPI), kegiatan ini memegang peranan krusial. Pengamanan terhadap serangan OPT menjadi aspek penting karena perubahan iklim dapat memengaruhi perkembangan dan ledakan suatu hama atau penyakit tertentu. Selain itu, penanganan DPI menjadi sangat relevan dalam menghadapi situasi iklim yang tidak menentu. Misalnya, saat El Nino yang membutuhkan dukungan pengairan, atau La Nina yang memerlukan penanganan banjir. Dengan demikian, kegiatan ini bertujuan untuk memitigasi dampak negatif yang dapat timbul akibat perubahan iklim yang tidak terduga.

Kombinasi antara kegiatan utama dan pendukung ini memperkuat sinergi dalam usaha meningkatkan potensi hasil tanaman padi dan jagung. Strategi ini menciptakan fondasi kokoh untuk memaksimalkan hasil pertanian dengan memastikan ketersediaan benih, efisiensi pascapanen dan pengendalian terhadap OPT serta penanganan DPI. Pendekatan holistik dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjaga ketahanan terhadap perubahan kondisi iklim yang semakin dinamis.

- a. Peningkatan Produksi Padi Kegiatan utama mendukung upaya kenaikan hasil produksi padi di tahun 2024, yaitu:

1) Kegiatan Kawasan Padi

Kegiatan meliputi berbagai kegiatan padi di sejumlah provinsi yang menunjukkan pencapaian mendekati target. Kegiatan padi reprioritasi di 16 provinsi mencapai 103.115 hektare (99,44% dari target); Oplah padi di 8 provinsi terealisasi seluas 178.932 hektare (99,18%); ABT oplah padi di 21 provinsi mencapai 536.950 hektare (99,21%); Optimalisasi padi di 5 provinsi mencapai 34.549 hektare (99,85%); dan padi kaya gizi (biofortifikasi) di 32 provinsi tercapai 180.514 hektare (90,26%)

2) Kegiatan Bantuan Benih Padi

Intervensi berupa benih padi inbrida menunjukkan realisasi tinggi di berbagai provinsi. Di 21 provinsi, realisasinya mencapai 657.845 hektare (99,65% dari target), sementara program reprioritas di 19 provinsi bahkan melampaui target dengan capaian 578.709 hektare (101,53%). Program oplah dan pompanisasi di 27 provinsi mencapai 727.152 hektare (100,77%), sedangkan optimalisasi di lima provinsi terealisasi 35.144 hektare (101,49%). Namun, program ekstensifikasi di Kalimantan Tengah baru mencapai 448 hektare (18,82% dari target 2.380 hektare), sementara bantuan benih padi inbrida (MP FE) di provinsi tersebut telah 100% terealisasi pada 11.500 hektare. Selain bantuan langsung, program

penangkaran benih padi oleh produsen bersertifikat di 32 provinsi menghasilkan 212.474,54 ton benih dari luas 70.824,85 hektare, meskipun hanya 167.556,33 ton (78,86%) yang lolos uji laboratorium. Secara keseluruhan, bantuan benih padi inbrida berkontribusi 19,32% terhadap penyediaan benih dari total realisasi tanam padi nasional yang mencapai 10.406.190 hektare menurut data KSA BPS.

3) Kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan (MANTAP) Padi Inbrida

Program MANTAP Padi Inbrida dirancang untuk mendorong peningkatan produksi benih secara in situ bersama petani penangkar sebagai pelaku utama serta didukung oleh berbagai pemangku kepentingan terkait. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat ketersediaan benih unggul di tingkat lokal sekaligus meningkatkan kemandirian petani dalam memenuhi kebutuhan benih secara berkelanjutan. Total alokasi mencapai 6.366 hektare, terdiri dari 5.766 hektare di 24 provinsi pada satker pusat, dengan realisasi 4.910 hektare (85,13%), serta 600 hektare di 18 provinsi pada satker TP yang telah terealisasi 100%. Dengan realisasi tanam 4.151 hektare dan produktivitas benih sekitar 4 ton/ha, kegiatan ini diperkirakan menghasilkan 16.606 ton benih padi inbrida.

b. Peningkatan Produksi Jagung

Perkembangan produksi jagung selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya fluktuasi pada aspek

luas panen, produktivitas, dan total produksi. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2022, disusul penurunan di tahun 2023, sebelum kembali mengalami kenaikan pada tahun 2024. Meskipun terdapat dinamika tahunan, tren dalam lima tahun terakhir secara keseluruhan menunjukkan arah yang positif. Rata-rata, luas panen meningkat sebesar 2,71% per tahun, produktivitas tumbuh sebesar 1,83%, dan total produksi mencatat kenaikan tahunan sebesar 4,71%, mencerminkan kemajuan yang konsisten dalam pengembangan komoditas jagung nasional.

2. Optimasi Lahan dan Mekanisasi Pertanian

Upaya khusus (Upsus) dalam peningkatan produksi padi dan jagung tidak semata difokuskan pada peningkatan indeks pertanaman (IP) maupun perluasan areal tanam, tetapi juga mencakup strategi optimasi lahan rawa tadah hujan. Pelaksanaan program ini mengusung pendekatan yang bersifat holistik, dengan mengintegrasikan prinsip partisipatif, pemberdayaan masyarakat, dan kerja sama lintas sektor. Pendekatan partisipatif dan pemberdayaan menjadi fondasi utama dalam pengelolaan lahan rawa tadah hujan, di mana berbagai pihak terlibat secara aktif, termasuk kelompok tani dan gabungan kelompok tani (Gapoktan), sektor swasta, pemerintah daerah, Badan Pengelola Sumber Daya Irigasi dan Prasarana (BPSIP), perguruan tinggi, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Kolaborasi multipihak ini bertujuan menggabungkan berbagai perspektif, pengetahuan, dan keahlian untuk

mencapai hasil yang optimal dalam peningkatan produksi pertanian. Dalam konteks pendekatan integratif, infrastruktur yang dibangun atau direhabilitasi diintegrasikan dengan lembaga pengelola, serta sarana dan teknologi produksi tanaman. Artinya, tidak hanya membangun infrastruktur fisik semata, tetapi juga mengaitkannya dengan lembaga pengelola dan berbagai sarana dan teknologi produksi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang terintegrasi dan berkesinambungan, sehingga hasil yang diinginkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Seiring dengan pendekatan tersebut, implementasi kegiatan Upsus dilakukan dengan strategi selektif, bertahap, dan melibatkan kemitraan. Strategi selektif mencerminkan pemilihan lokasi, jenis infrastruktur, dan spesifikasi teknologi produksi yang didasarkan pada karakteristik dan kondisi wilayah setempat. Sementara itu, strategi bertahap menunjukkan bahwa implementasi kegiatan dilakukan secara bertahap, namun tetap memiliki target waktu pelaksanaan yang jelas, serta output dan sasaran yang konkret. Dalam keseluruhan pendekatan ini, tergambar komitmen untuk mencapai peningkatan produktivitas padi dan jagung dengan memperhitungkan konteks lokal dan melibatkan semua *stakeholder* terkait. Strategi yang diterapkan bukan hanya merinci langkah-langkah teknis, tetapi juga menekankan aspek keberlanjutan, keadilan, dan kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian, Upsus dalam optimasi lahan rawa tadah hujan menjadi landasan yang kokoh untuk

meningkatkan ketahanan pangan dan mencapai hasil yang signifikan dalam peningkatan produksi padi dan jagung di Indonesia.

Peran ketersediaan alat dan mesin pertanian pada kegiatan Upsus untuk pencapaian produksi padi dan jagung mempunyai kontribusi yang signifikan pada tahap prapanen. Alat dan mesin prapanen digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari pembukaan lahan hingga pengelolaan tanaman, serta menciptakan sistem pertanian yang lebih efisien dan berkelanjutan. Sejalan dengan itu, traktor roda dua dan roda empat turut berkontribusi dalam penyediaan sarana produksi. Alsintan tersebut membantu dalam pemupukan dan penyemprotan pestisida, mempercepat proses penyediaan nutrisi, dan perlindungan tanaman. Pengelolaan tanaman juga semakin terfasilitasi melalui mekanisasi. Traktor dan *hand sprayer* memberikan kemudahan dalam penyiraman, pemupukan, dan penyemprotan pestisida secara presisi. Keterlibatan alat ini dalam prapanen berdampak pada efisiensi pemanfaatan waktu dan tenaga, serta meningkatkan produktivitas pertanian secara keseluruhan.

Mekanisasi pertanian dalam konteks Upsus tidak hanya menciptakan efisiensi dalam proses prapanen dan pengelolaan tanaman, tetapi juga mendukung visi holistik dalam peningkatan ketahanan pangan nasional. Integrasi teknologi pertanian modern menciptakan fondasi yang kokoh untuk mencapai hasil pertanian yang optimal dalam skala besarserta menjawab tuntutan akan

ketersediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan di Indonesia.

Kegiatan optimasi lahan dalam rangka peningkatan pemanfaatan lahan rawa diharapkan dapat meningkatkan infrastruktur lahan pertanian rawa melalui pembangunan/rehabilitasi infrastruktur tata lahan dan tata air, sehingga memberikan manfaat dalam meningkatkan produksi dan/atau meningkatnya indeks pertanaman. Kegiatan optimasi lahan rawa terdiri dari beberapa kegiatan meliputi:

a. SID Optimasi Lahan

Kontrak penyusunan SID dilakukan di seluruh wilayah pada 12 provinsi (Aceh, Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan) dan survey identifikasi desain dilaksanakan di seluruh wilayah pada 12 provinsi sesuai dengan kontrak yang telah dilakukan. Untuk kegiatan ini dapat direalisasikan sesuai tahapan, meliputi: (1) Kontrak seluas 351.657 hektare (99,35%); (2) Survei/investigasi seluas 351.011 hektare (99,82%); dan (3) Desain seluas 351.011 hektare (99,82%). Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan SID, yaitu curah hujan tinggi sehingga menyebabkan lahan tergenang dan menghambat penyelesaian SID, sehingga pekerjaan SID baru dilaksanakan pada pertengahan tahun. Terlambatnya pekerjaan SID dapat berdampak pada

lambatnya pelaksanaan tahapan optimasi lahan selanjutnya.

b. Konstruksi Optimasi Lahan

Kegiatan konstruksi meliputi kegiatan yang dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur yang telah dirancang. Untuk fisik kegiatan sudah terealisasi seluas 348.758 hektare atau sebesar 99,36% dari target pada tahun 2024 seluas 351.017 hektare. Dalam pelaksanaannya, meskipun tidak banyak namun terdapat tantangan atau kendala, yaitu tingginya curah hujan sehingga menyebabkan lahan tergenang dan menghambat progres/penyelesaian konstruksi. Selain itu, pada praktiknya terdapat beberapa lokasi melakukan penanaman tanpa olah tanah.

c. Kegiatan Olah Tanah Optimasi Lahan Rawa

Kegiatan olah tanah pada tahun 2024 dilakukan di Aceh, Sumatra Utara, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Papua Selatan. Realisasi fisik kegiatan olah tanah dilakukan di 12 provinsi yang telah ditargetkan yang terdiri atas 74 Kabupaten dengan total luasan sebesar 267.005 hektare atau 77,11% dari target seluas 346.278,25 hektare. Kegiatan olah tanah dilakukan untuk mempersiapkan tanah hingga siap tanam, dengan melakukan penggemburan, pemupukan tanah sehingga dapat meningkatkan kesuburan dan struktur tanah.

Pelaksanaan olah tanah dengan baik dapat meningkatkan kondisi fisik dan kimia tanah sehingga tanah siap untuk ditanam dan tanaman dapat tumbuh dengan optimal.

3. Penguatan SDM Pertanian melalui Peningkatan Kapasitas

Penguatan sumber daya manusia (SDM) pertanian memegang peran kunci dalam mendorong keberhasilan berbagai inisiatif yang mendukung upaya khusus (Upsus) percepatan tanam padi dan jagung di Indonesia. Untuk mencapai target tersebut, para petani, penyuluh, dan pelaksana standar instrumen pertanian perlu dibekali dengan beragam materi penyuluhan, pelatihan teknis, serta kegiatan pendukung lainnya. Pembekalan ini bertujuan untuk mempercepat dan memperluas cakupan tanam, sehingga dapat mendorong peningkatan produksi padi dan jagung secara signifikan di tingkat nasional.

C. Solusi Terhadap Program dan Anggaran Terdampak

APBN merupakan instrumen penganggaran keuangan negara yang bersifat fleksibel dan menyesuaikan kondisi eksternal baik kondisi global, lingkungan, sosial, politik, budaya, dan lainnya. Fenomena El Nino yang menguat pada tahun 2024 dan berpengaruh terhadap produksi komoditas pertanian, utamanya padi sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, mengharuskan Kementerian Pertanian untuk melakukan langkah-langkah strategis

melalui revisi internal dalam rangka perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan lingkup Kementerian Pertanian.

Pembangunan pertanian diperlukan ketersediaan anggaran yang cukup, manajemen profesional, serta alokasi tepat sasaran serta efisien, sehingga tidak hanya mengandalkan APBN, melainkan dapat juga bersumber dari pendanaan lain, seperti investasi swasta, perbankan, dan swadaya masyarakat, serta mengoptimalkan berbagai skema pendanaan, termasuk kredit usaha rakyat (KUR), untuk memperkuat pembangunan sektor pertanian.

Upaya Kementerian Pertanian melalui reprioritasi, *refocusing*, dan/atau realokasi terutama untuk peningkatan produksi padi dan jagung berdampak signifikan terhadap pencapaian target produksi padi dan jagung serta potensi importasi berkurang. Proses ini dilaksanakan melalui koordinasi intensif antara pihak-pihak terkait, terutama Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, K/L lain, sehingga DIPA revisi anggaran Kementerian Pertanian TA 2024 dapat dilaksanakan.

Implementasi reprioritasi kebijakan pembangunan pertanian yang hanya fokus pada beberapa program prioritas untuk peningkatan produksi padi dan jagung tentunya berdampak terhadap capaian output dari program-program pembangunan pertanian lainnya. Dampak ini telah dipertimbangkan oleh Kementerian Pertanian dengan memperhatikan aspek urgensi dan ketersediaan anggaran yang memadai, serta telah berkomitmen untuk tetap menjaga pencapaian output prioritas yang menurun pada tahun 2023 akan dipenuhi pada tahun 2024, di antaranya

peningkatan produksi beras, jagung, dan tidak terjadi penurunan produksi daging sapi nasional, penurunan pelayanan kesehatan hewan, penurunan populasi ternak sapi, penurunan komoditas perkebunan dan hortikultura, dan lainnya.

Berbagai upaya yang telah dilakukan terbukti memberikan dampak positif yang signifikan, terlihat dari peningkatan produksi beberapa komoditas strategis pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi jagung, misalnya mencapai 20,48 juta ton atau naik sebesar 2,47%. Demikian pula produksi bawang merah yang meningkat 5,07% menjadi 2,09 juta ton, bawang putih sebesar 0,48% menjadi 39,4 ribu ton, susu yang tumbuh 2,66% mencapai 808,35 ribu ton, serta produksi telur yang naik 4,42% menjadi 6,88 juta ton (Kementan, 2024).

Meski demikian, sektor pertanian masih menghadapi sejumlah tantangan serius, seperti penurunan produksi beberapa komoditas strategis, keterbatasan luas lahan milik petani, fluktuasi harga di tingkat petani dan peternak, wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) serta penyakit penting lainnya, serangan hama dan penyakit tanaman, serta dampak cuaca ekstrem akibat perubahan iklim. Selain itu, penerapan kebijakan *automatic adjustment* pada pertengahan tahun juga turut memengaruhi pencapaian target produksi komoditas pangan strategis.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Kementerian Pertanian telah mengambil langkah strategis, antara lain melalui penguatan regulasi, pengembangan korporasi petani, pembentukan kawasan komoditas,

peningkatan dari sisi produksi dan kualitas komoditas ekspor, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, serta mitigasi, adaptasi terhadap DPI, disertai pemetaan potensi pengembangan lahan pertanian.

D. Kebijakan Efisiensi Anggaran Kementerian Pertanian TA 2025 melalui Restrukturisasi Anggaran

Restrukturisasi anggaran Kementerian Pertanian untuk TA 2025 sejalan dengan Inpres, di antaranya mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%, membatasi kegiatan seremonial maupun *focus group discussion* (FGD), membatasi honorarium tim, memfokuskan anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik, selektif dalam pemberian hibah, dan sumber belanja non-efisien lainnya.

Kebijakan restrukturisasi ini juga merespons gejala domestik yang menunjukkan potensi kurangnya pangan nasional yang mencakup stagnasi hingga penurunan produksi padi nasional karena gangguan produksi akibat perubahan iklim, kelangkaan dan kenaikan harga sarana produksi pangan terutama pupuk dan pestisida, kepemilikan lahan produksi pangan yang sempit dengan efisiensi usaha tani tanaman pangan yang rendah, alih fungsi dan degradasi lahan produksi tanaman pangan, penurunan daya beli masyarakat akibat pendapatan yang tidak stabil, dan gangguan stok dan distribusi beras nasional akibat gangguan produksi dan distribusi/transportasi. Selain itu, faktor adanya perubahan iklim ekstrem, tekanan geopolitik yang saat ini semakin dinamis di Timur Tengah yang berdampak terhadap menurunnya produksi dan

terganggunya distribusi pangan, melambungnya harga komoditas pangan yang mengakibatkan tingginya inflasi serta memicu terjadinya krisis pangan dunia.

Pada saat itu berdasarkan data KSA BPS (angka sementara 2024) menyebutkan produksi beras Januari–Desember 2024 sebesar 30,34 juta ton, menurun 0,76 juta ton dibanding produksi 2023 yang sebesar 31,10 juta ton. Hal ini disebabkan karena menurunnya luas panen dari 10,21 juta hektare pada tahun 2023, menjadi 10,05 juta hektare pada tahun 2024. Dengan jumlah konsumsi sebesar 30,91 juta ton, maka diprediksi kebutuhan beras tahun 2024 minus 0,57 juta ton.

Merespons hal tersebut, Kementerian Pertanian melakukan langkah cepat dengan menyusun strategi, program dan kegiatan, serta penyesuaian-penyesuaian terhadap rencana kerja dan anggaran (RKA) tahun anggaran 2025. Penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan tentunya berdampak terhadap perubahan struktur penganggaran, target dan indikator pencapaian output Kementerian Pertanian TA 2025, serta bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan terutama beras, menyediakan pangan yang cukup bagi masyarakat dalam upaya mendukung pencapaian swasembada pangan berkelanjutan menuju lumbung pangan dunia. Peningkatan produksi padi untuk mendukung swasembada pangan merupakan inisiatif strategis yang melibatkan unit eselon I di Kementerian Pertanian, yakni Direktorat Jenderal (Ditjen) Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Ditjen Lahan dan Irigasi Pertanian, Badan Penyuluhan dan SDM

Pertanian, dan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Ditjen Hortikultura, Ditjen Perkebunan dan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Masing-masing unit memiliki peran utama dalam merancang dan melaksanakan kegiatan-kegiatan terpadu untuk mencapai peningkatan produksi padi.

Peningkatan produksi padi untuk swasembada pangan juga menempatkan faktor-faktor kunci sebagai fondasi utama untuk mencapai tujuan peningkatan produksi. Dalam konteks program ini, faktor-faktor tersebut secara erat terkait dan saling mendukung, yang di antaranya mencakup ketersediaan lahan, benih unggul, pupuk dan pestisida, perbaikan sistem pengairan dan mekanisasi pertanian, serta penguatan SDM pertanian. Keseluruhan faktor-faktor kunci tersebut perlu diupayakan oleh unit kerja terkait di lingkup Kementerian Pertanian, dengan menjadikan sasaran peningkatan produksi padi sebagai target bersama di dalam jangka pendek (2025-2026), dan sasaran Indonesia sebagai lumbung pangan dunia sebagai target bersama jangka panjang sampai dengan 2033.

Faktor penting atas kegiatan ini adalah adanya dukungan dari *stakeholder* Kementerian Pertanian, yaitu keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk akselerasi kegiatan teknis dan juga sinergi dengan pemerintah daerah terutama dari dinas pertanian dari tingkat provinsi hingga kabupaten. Selain itu, juga dukungan dari kementerian seperti Kementerian PU, Kemendes, Kemendagri, dan kementerian/lembaga terkait lainnya, dengan fokus pada kegiatan optimasi lahan 2024 (lanjutan), Oplah tahun 2025, cetak sawah, pompanisasi tadah hujan

untuk perluasan areal tanam (PAT), peningkatan potensi tanam dan perluasan areal tanam baru (PATB) padi gogo.

1. Optimasi Lahan

Peningkatan produksi padi tidak hanya terfokus pada perluasan areal tanam, melainkan juga melibatkan strategi optimasi lahan (Oplah). Tujuan Oplah untuk meningkatkan infrastruktur lahan pertanian rawa melalui pembangunan/rehabilitasi infrastruktur tata lahan dan tata air, serta meningkatkan indeks pertanaman (IP). Oplah terdiri atas kegiatan peningkatan infrastruktur lahan dan air serta kegiatan pengolahan tanah. Kegiatan peningkatan infrastruktur adalah aktivitas untuk membangun atau merehabilitasi infrastruktur lahan dan tata air dengan mengacu pada dokumen survei investigasi desain (SID), dalam hal jenis, volume, bentuk, dan penempatan infrastruktur tersebut.

Oplah pada lahan rawa dimaksudkan untuk produktivitas lahan karena lahan rawa memiliki kendala, seperti tingkat kesuburan yang rendah, pH tanah yang sangat masam, kondisi air pasang/surut, infrastruktur lahan dan air, biaya usaha tani yang relatif lebih tinggi, dan kelembagaan petani. Oleh karena itu, optimasi lahan rawa harus dilakukan melalui kegiatan, seperti perbaikan infrastruktur lahan dan air dengan prioritas kegiatan pada pembangunan/rehabilitasi saluran irigasi, penguatan tanggul, drainase, infrastruktur lain, dan pembuatan/rehabilitasi serta penataan infrastruktur lahan. Target kegiatan oplah yang dilakukan tahun 2025 sekitar 850 ribu hektar, terdiri dari 351 ribu hektar lanjutan kegiatan oplah dari tahun 2024 dan oplah lokasi tambahan di 500 ribu hektare.

Dalam melaksanakan kegiatan ini, pendekatan yang diusung sangatlah holistik, menggabungkan aspek partisipatif, pemberdayaan masyarakat, dan integratif. Pendekatan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat menjadi inti dari implementasi kegiatan di lahan rawa. Artinya, proses pelaksanaannya secara aktif melibatkan berbagai pihak, termasuk kelompok tani/Gapoktan, sektor swasta, pemerintah daerah (Pemda), Badan Pengelola Sumber Daya Irigasi dan Prasarana (BPSIP), dan institusi pendidikan, seperti universitas dan lembaga nonpemerintah (LSM). Kolaborasi lintas sektor ini diarahkan untuk menggandeng berbagai perspektif, pengetahuan, dan keahlian guna mencapai hasil yang optimal.

Dalam konteks pendekatan integratif, infrastruktur yang dibangun atau direhabilitasi diintegrasikan dengan lembaga pengelola, serta sarana dan teknologi produksi tanaman. Artinya, tidak hanya membangun infrastruktur fisik semata, tetapi juga mengaitkannya dengan lembaga pengelola dan berbagai sarana serta teknologi produksi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang terintegrasi dan berkesinambungan sehingga hasil yang diinginkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Seiring dengan pendekatan tersebut, implementasi kegiatan ini dilakukan dengan strategi selektif, bertahap, dan melibatkan kemitraan. Strategi selektif mencerminkan pemilihan lokasi, jenis infrastruktur, dan spesifikasi teknologi produksi yang didasarkan pada karakteristik dan kondisi wilayah setempat. Sementara itu, strategi bertahap menunjukkan bahwa implementasi kegiatan dilakukan secara

bertahap, namun tetap memiliki target waktu pelaksanaan yang jelas, serta output dan sasaran yang konkret. Dalam keseluruhan pendekatan ini, tergambar komitmen untuk mencapai peningkatan produktivitas padi dengan memperhitungkan konteks lokal dan melibatkan semua *stakeholder* terkait. Strategi yang diterapkan bukan hanya merinci langkah-langkah teknis, tetapi juga menekankan aspek keberlanjutan, keadilan, dan kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian, kegiatan dalam optimasi lahan rawa menjadi landasan yang kokoh untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mencapai hasil yang signifikan dalam peningkatan produksi padi di Indonesia.

2. Cetak Sawah

Untuk mengupayakan pencapaian target luas panen dan peningkatan produktivitas padi, diperlukan strategi yang komprehensif, yaitu dengan memadukan ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi utamanya dilakukan dengan melakukan pencetakan sawah baru seluas tiga juta hektare, yang direncanakan akan dilaksanakan selama tiga tahun (2025–2027). Penambahan sawah baru tersebut dalam jangka panjang berpotensi menambah luas panen padi sebanyak 6 juta hektare (asumsi satu tahun ditanam dua kali padi).

Program cetak sawah 3 juta hektare akan dilakukan selama tiga tahun ke depan, yang pada tahun 2025 akan dilakukan di Provinsi Papua Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatra Selatan dengan target seluas 225 ribu hektare.

3. Pompanisasi Tadah Hujan untuk Perluasan Areal Tanam (PAT)

Pompanisasi merupakan langkah untuk mempercepat peningkatan produksi padi melalui optimasi lahan rawa dan peningkatan indeks pertanaman padi pada lahan sawah tadah hujan, utamanya pada musim kemarau. Pompanisasi mampu mencegah gagal panen akibat kekeringan atau kekurangan air yang sering kali menjadi ancaman bagi lahan pertanian. Pompanisasi diharapkan dapat membantu percepatan tanam pada daerah persawahan yang berdekatan dengan sungai, penyelamatan tanaman eksisting yang terkena kekeringan, dan memastikan ketersediaan air pada periode musim tanam II dan III.

Pada program pompanisasi ini, pemerintah melalui Kementerian Pertanian memberikan bantuan alat pompa air kepada petani untuk mengairi sawah. Target bantuan pompa air yang diberikan tahun 2024 sebanyak 62.378 unit, realisasi bulan Januari–Oktober 2024 sebanyak 61.472 unit atau 98,63%. Pada tahun 2025, target pompanisasi tadah hujan untuk perluasan areal tanam sebanyak 500 ribu hektare dan jumlah unit yang akan dialokasikan sebanyak 27 ribu unit pompa.

Mekanisasi pertanian dalam konteks peningkatan produksi padi tidak hanya menciptakan efisiensi dalam proses prapanen dan pengelolaan tanaman, tetapi juga mendukung visi holistik dalam peningkatan ketahanan pangan nasional. Integrasi teknologi pertanian modern menciptakan fondasi yang kokoh untuk mencapai hasil pertanian yang optimal dalam skala

besar, menjawab tuntutan akan ketersediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan di Indonesia.

4. Peningkatan Potensi Tanam Bekerja Sama dengan Kementerian PU

Berbagai upaya peningkatan produksi padi dilakukan oleh Kementerian Pertanian melalui kerjasama dengan Kementerian PU dalam pemanfaatan bendungan untuk irigasi sawah dengan target 1 juta hektare, sehingga mampu meningkatkan indeks pertanaman (IP) dan meningkatkan produksi padi.

Hingga akhir tahun 2024, Kementerian PU telah menyelesaikan 45 bendungan (dari 53 target bendungan) dan berkontribusi layanan air irigasi seluas 352 ribu hektare yang berpotensi menambah luas tanam 222 ribu hektare, dan meningkatkan ekstensifikasi pertanian seluas 83 ribu hektare.

Kementerian PU juga telah melakukan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi. Ada potensi intensifikasi pertanian seluas 187 ribu hektare pada 73 daerah irigasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan meningkatkan luas tanam melalui optimalisasi IP, akan ada peningkatan luas menjadi 74 ribu hektare.

5. Perluasan Areal Tanam Baru (PATB) Padi Gogo

Salah satu upaya peningkatan produksi padi yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian adalah perluasan areal tanam baru (PATB) melalui program tumpang sisip padi gogo. Program ini diluncurkan dengan fokus utama pada penanaman padi disela-sela tanaman lain yang sudah ada di lahan pertanian, khususnya pada perkebunan kelapa sawit dan

kelapa. Kedua komoditas tersebut merupakan tanaman tahunan yang membutuhkan waktu cukup lama untuk menghasilkan buah. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian memanfaatkan waktu tersebut untuk tumpang sili padi gogo.

Pendekatan yang dilakukan pada program PATB padi gogo adalah dengan memanfaatkan lingkungan berupa hara, air, dan sinar matahari berdasarkan sistem tumpang sili. Tujuannya adalah menghemat biaya pengolahan tanah, menambah penghasilan setiap satuan luas lahan.

Komoditas tumpang sili tidak lebih tinggi dari tanaman utama dan memiliki sistem perakaran dan tajuk yang menempati horizon tanah dan ruang di atas tanah yang berbeda. Selain itu, bukan merupakan tanaman inang bagi hama dan penyakit serta tidak lebih peka dari tanaman utama terhadap serangan hama dan penyakit. Tumpang sili juga tidak menyebabkan kerusakan tanaman utama serta menyebabkan terjadinya erosi atau kerusakan tanah.

Program Tumpang sili Tanaman Pangan (Kesatria) khususnya padi gogo saat ini memiliki prospek yang cukup besar. Luas areal sawit nasional saat ini mencapai 16,38 juta hektare tersebar di 22 provinsi dan 140 kabupaten. Dari luasan tersebut, sebanyak 1 juta hektare berpotensi untuk dikembangkan tumpang sili padi gogo, terdiri dari 735 ribu hektare perkebunan rakyat dan 265 ribu hektare perkebunan besar. Saat ini, masa tanaman belum menghasilkan (TBM) kelapa sawit 1--2 tahun, sehingga tanaman padi gogo dapat ditanam dengan IP 100.

Total potensi penanaman padi gogo pada lahan perkebunan sawit tahun 2025 sebanyak 510 ribu hektare yang

berasal dari GAPKI, PTPN III Holding, Asosiasi Petani Sawit, Hasil identifikasi CPCL dan Realisasi PAT tahun 2024, PSR, dan Rekomendasi Teknis PSR

BAB 3

KEBERHASILAN REPRIORITASI ANGGARAN

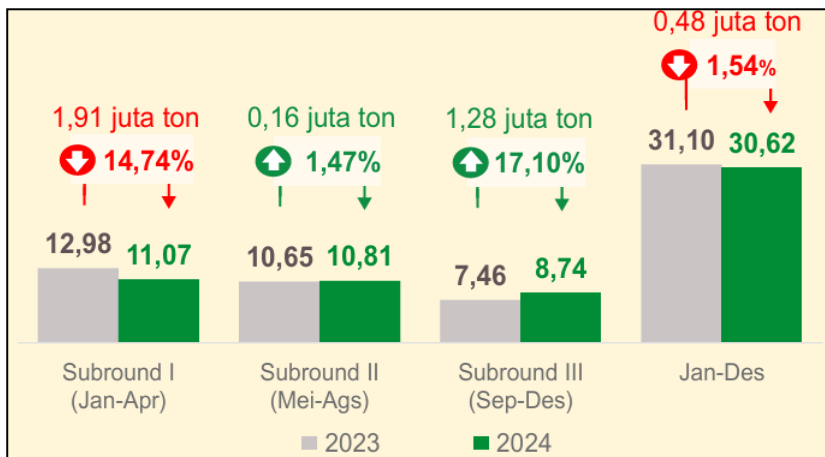
Dinamika perencanaan dan penganggaran melalui reprioritasi anggaran tahun 2024 dan disusul adanya kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 secara nasional disikapi dengan melakukan langkah-langkah strategis, berupa restrukturisasi anggaran dalam rangka melakukan efektivitas pemanfaatan anggaran. Hal tersebut mampu memberikan dampak positif terhadap capaian kinerja Kementerian Pertanian tahun 2024 dan awal tahun 2025. Capaian ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh pihak terkait secara internal dan dukungan serta kolaborasi dari instansi terkait sehingga memberikan dampak yang cukup signifikan.

A. Kenaikan Produksi Beras

Badan Pusat Statistik (2025) menyatakan bahwa secara agregat produksi komoditas pada tahun 2024 secara umum mengalami kontraksi penurunan dengan produksi beras sebesar 30,62 juta ton atau turun 0,48 juta ton dibanding tahun 2023. Namun demikian, jika dilakukan pencermatan berdasarkan reprioritasi anggaran pada akhir *subround* II (Agustus) dan *subround* III (September–Desember) tahun 2024, kebijakan yang dilaksanakan memberikan dampak kenaikan produksi beras yang signifikan.

Produksi beras bulan Agustus 2024 sebesar 2,95 juta ton lebih tinggi sebesar 0,43 juta ton (16,92%) dari produksi tahun 2023 sebesar 2,52 juta ton. Dampak reprioritasi

anggaran terlihat nyata pada *subround* III (September–Desember) tahun 2024, jika dibandingkan periode yang sama tahun 2023 produksi beras mengalami kenaikan sebesar 1,28 juta ton atau 17,10% (tahun 2024 sebesar 8,74 juta ton lebih tinggi dibanding tahun 2023 sebesar 7,46 juta ton). Jika digabungkan pada periode Agustus sampai dengan Desember tahun 2024, dampak reprioritasi anggaran yang tepat mampu memberikan kenaikan sebesar 1,71 juta ton.



Gambar 6. Produksi beras tahun 2023–2024
Sumber: BPS, 2025

Salah satu faktor penentu adalah ketepatan dalam reprioritasi kegiatan berdasarkan penganggaran yang tersedia. Pemenuhan sarana dan prasarana produksi bagi petani untuk melakukan budi daya dan pompanisasi pada

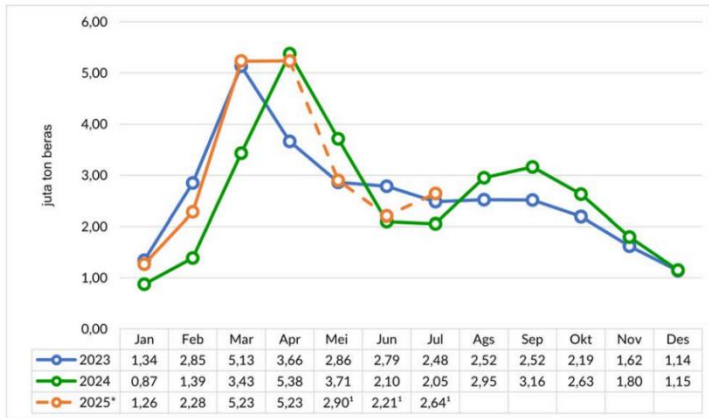
saat musim kemarau menyebabkan petani mampu menyediakan air bagi pertanaman padi dan ketersediaan alsintan prapanen maupun pascapanen. Ini merupakan kebijakan yang tepat sehingga mampu memberikan pengaruh dan dampak yang nyata bagi petani dan secara umum kondisi pangan nasional.

Berdasarkan hasil survei kerangka sampel area (KSA) 2025, luas panen padi pada bulan **Januari–April 2025 sebesar 4,49 juta hektare atau meningkat sebesar 25,82% dibandingkan periode yang sama tahun 2024.** Pada bulan Januari, luas panen sebesar 416.298 hektare (naik sebesar 122.791 hektare atau 41,84%) dibanding Januari tahun 2024. Pada bulan Februari, luas panen sebesar 756.823 hektare (naik sebesar 294.014 hektare atau 63,53%) dibanding Februari tahun 2024 serta pada bulan Maret 2025, luas panen sebesar 1.666.939 hektare (naik sebesar sebesar 560.075 hektare atau 50,60%) dibandingkan Maret 2024 dan bulan April luas panen sebesar 1.652.560 hektare (turun sebesar -54.954,33 atau 3,22%) dibanding April 2024.



Gambar 7. Luas panen padi tahun 2023–2025
Sumber: BPS, 2025

Kebijakan reprioritasi anggaran pada tahun 2024 terlihat hasilnya pada panen padi sepanjang Januari–Maret 2025 seluas 2,85 juta hektare dengan angka sementara produksi beras setara 8,77 juta ton. Selanjutnya, proses restrukturisasi anggaran tahun 2025 yang terlihat pada panen bulan April 2025 menunjukkan data luas panen sebesar 1,65 juta hektare dengan angka sementara produksi beras setara 5,23 juta ton. Total luas panen padi pada periode Januari–April 2025 sebesar 4,5 juta hektare dan angka sementara produksi beras sebesar 14,01 juta ton (BPS, 2025).



Catatan: *Angka sementara

¹Angka potensi

Perbedaan angka di belakang koma disebabkan oleh pembulatan angka

Gambar 8. Produksi beras tahun 2023–2025

Sumber: BPS, 2025

B. Penurunan Impor Beras

Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa nilai impor beras pada bulan Januari–Maret 2025 apabila dibandingkan periode yang sama tahun 2024, mengalami penurunan signifikan. Impor beras Indonesia tercatat sebesar 112,12 ribu ton pada Januari–Maret 2025 atau turun 92,26% (C-to-C) dari Januari–Maret 2024 yaitu sebesar 1,44 juta ton.

Berdasarkan penjelasan Menteri Perdagangan bahwa beras yang diimpor adalah jenis beras yang tidak termasuk beras cadangan beras pemerintah (CBP) dan merupakan jenis beras khusus serta kebijakan impor tidak dilakukan oleh pemerintah untuk CBP sepanjang 2025 (Ayuningrum, 2025).

Secara detail jenis beras khusus yang diimpor disajikan pada Tabel 23.

Tabel 23. Data impor beras jenis khusus Januari–Maret Tahun 2025

Kode HS	Jenis Beras	Volume (ton)	Nilai (US\$)
10061010	<i>Rice in the husk (paddy), suitable for sowing</i>	8	160.000
10061090	<i>Rice in the husk, not suitable for sowing</i>	0,05	104
10062090	<i>Husked (brown) rice, non-hom mali</i>	0,11	464
10063050	<i>Basmati rice, semi/fully milled, whether or not polished/glazed</i>	740	824.529
10063070	<i>Other fragrant rice, semi/fully milled, whether or not polished/glazed</i>	0,27	411
10063091	<i>Parboiled rice, semi/fully milled, whether or not polished/glazed</i>	45	31.146
10063099	<i>Other milled rice (di luar HS 10063030–10063091)</i>	69.750	36.900.000
10064090	<i>Broken rice, not for animal feed</i>	41.580	22.700.000
	TOTAL	112.123	60.616.654

Sumber: BPS dan detik.com, 2025



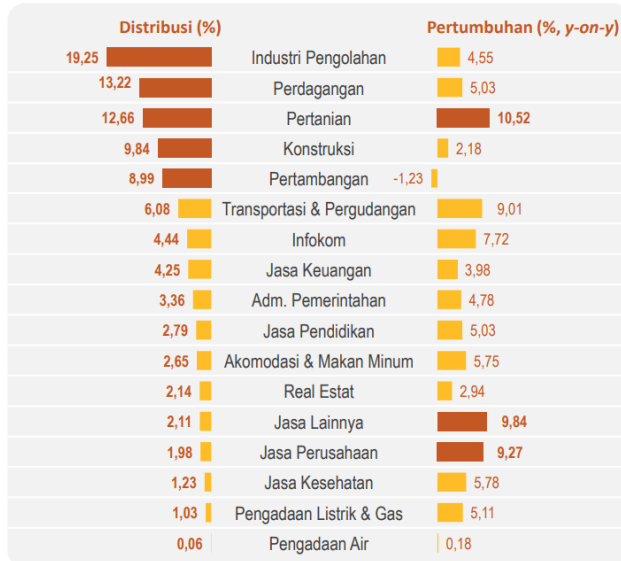
Gambar 9. Konferensi Pers pengungkapan pupuk palsu dan rencana perubahan kebijakan impor beras, Selasa (26/11/2024)

Sumber: Biro KLI Kementan, 2024

Senada dengan penjelasan tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan bahwa pada triwulan pertama tahun 2025, penerimaan bea masuk yang berasal dari komoditas beras menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Salah satu penyebab utama dari kondisi ini adalah tidak dilaksanakannya kegiatan impor beras oleh Perum Bulog, sebagaimana yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan pemerintah yang tidak lagi memberikan kuota impor beras pada tahun tersebut berimplikasi langsung terhadap pendapatan dari sektor kepabeanan.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, nilai bea masuk dari komoditas padi dan beras pada Januari hingga Maret 2025 hanya mencapai Rp 51,2 miliar. Angka ini menunjukkan penurunan tajam sebesar 92,1% dibanding tahun 2024 untuk periode yang sama (Muslimawati, 2025). Secara keseluruhan bahwa adanya peningkatan produksi domestik, dukungan kebijakan pemerintah yang proaktif dalam mewujudkan swasembada pangan, dan stok beras yang melimpah telah memungkinkan Indonesia untuk mengurangi impor beras secara signifikan pada tahun 2025.

Dampak secara makro keberhasilan prioritasi anggaran Kementerian Pertanian tahun 2024 dapat dijelaskan pada nilai produk domestik bruto (PDB) triwulan I tahun 2025. Sektor pertanian tumbuh sebesar 10,52% paling tinggi dibandingkan sektor unggulan lainnya seperti sektor industri pengolahan (4,55%), perdagangan (5,03%), konstruksi (2,18%), transportasi dan perdagangan (9,01%), dan lainnya. Panen raya pada awal tahun 2025 memberi pengaruh besar pada pencapaian PDB triwulan I 2025 (BPS, 2025). Secara proporsi nilai PDB, sektor pertanian juga masih menempati posisi tiga (12,66%) setelah industri pengolahan (19,25%), dan perdagangan (13,22%).



Gambar 10. Produk Domestik Bruto (PDB) triwulan I tahun 2025
Sumber: BPS, 2025

Secara komprehensif ekspor bukanlah satu-satunya fokus, namun juga menekankan pentingnya menjaga harga jagung di tingkat petani, yang saat panen raya seringkali anjlok di bawah harga pembelian pemerintah (HPP). Momentum ekspor mencerminkan arah baru dalam kebijakan pertanian nasional, yaitu produksi berbasis efisiensi, orientasi ekspor yang terukur, dan keberpihakan terhadap petani kecil.



Gambar 11. Pelepasan ekspor jagung di Gorontalo tahun 2024
Sumber: ANTARA/HO-Biro KLI Kementan, 2024

Gorontalo dijadikan sebagai model percontohan nasional dalam keberhasilan mengakselerasi produksi dan membuka akses pasar luar negeri secara cepat dan efektif.

Transformasi jagung dari komoditas yang diimpor menjadi komoditas ekspor bukanlah hasil kebetulan. Ia merupakan buah dari kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengusaha, dan petani. Dengan pendekatan yang tepat, provinsi lain di Indonesia dapat mereplikasi keberhasilan ekspor untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan menjaga ketahanan pangan nasional terus terwujud.

Optimalisasi/perluasan lahan melalui penyediaan sarana produksi mampu memberikan dampak pada

optimalisasi produksi. Ketersediaan infrastruktur berupa irigasi dan keberadaan Pelabuhan Anggrek di Gorontalo Utara sebagai pintu ekspor langsung mempercepat logistik dan efisiensi distribusi. Keterlibatan mitra swasta dalam melakukan penyerapan hasil panen juga memberikan dukungan ketersediaan jagung untuk dilakukan ekspor. Hal penting lain adalah perwujudan komitmen Kementerian Pertanian menuju swasembada pangan dan ekspor, bahwa Indonesia tidak hanya stop melakukan impor, tetapi juga ingin menjadi negara eksportir pangan sehingga mampu terus menguatkan kegiatan ekspor secara jangka panjang di samping penyediaan untuk dalam negeri (BSIP Sereal, 2024)

BAB 4

DAYA DUKUNG PROGRAM EFISIENSI ANGGARAN

A. Respon dan Dampak Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran pada Kementerian Pertanian memberikan dorongan dan semangat untuk tetap menjaga target yang telah ditetapkan melalui reprioritasi anggaran tahun 2024 dan restrukturisasi anggaran tahun 2025. Fokus efisiensi anggaran pada kegiatan yang mampu mengungkit prioritas dan mampu menjaga capaian Kementerian Pertanian.

Efisiensi anggaran merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi dan pengelolaan keuangan negara yang diarahkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan berorientasi hasil. Dalam konteks pembangunan sektor pertanian, efisiensi anggaran tidak hanya mencerminkan pemangkasan belanja, tetapi juga upaya merasionalisasi dan mengarahkan anggaran kepada kegiatan yang memiliki *cost-effectiveness* tinggi. Oleh karena itu, efisiensi anggaran di Kementerian Pertanian dapat memberikan dampak positif terhadap capaian strategis, seperti swasembada pangan apabila dilakukan secara terencana, berbasis bukti, dan berorientasi pada hasil.

Efisiensi anggaran merupakan strategi yang bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan dengan hasil (*output* dan *outcome*) yang setara atau lebih

tinggi. Dalam sektor pertanian, kebijakan efisiensi anggaran tidak hanya dimaknai sebagai penghematan biaya, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan efektivitas program pembangunan pertanian dalam mendukung ketahanan dan swasembada pangan.

Tahun anggaran 2024 menjadi momen krusial bagi Kementerian Pertanian untuk menerapkan prinsip efisiensi secara menyeluruh, menyusul kebijakan pemerintah untuk melakukan realokasi dan penyesuaian belanja negara. Kementerian Pertanian melakukan reprioritasi anggaran secara sistematis dengan tetap menjaga keberlangsungan program strategis nasional di bidang pertanian.

Tahun 2024 menjadi tahun penting dalam sejarah pengelolaan anggaran sektor pertanian. Di tengah tantangan fiskal dan tekanan global terhadap ketersediaan pangan, Kementerian Pertanian mengambil langkah taktis melakukan *refocusing* dan reprioritasi anggaran. Kebijakan ini bukan sekadar pemangkasan administratif, melainkan reposisi strategis untuk menjawab pertanyaan besar dalam upaya menjamin kedaulatan pangan dengan sumber daya minimal.

“Hasil Optimal bisa tetap kami capai dengan anggaran yang terbatas. Permasalahan anggaran tidak menjadi penghambat dan apapun situasinya yang utama adalah swasembada tercapai,” (BSIP, 2025)



Gambar 12. Arahan Menteri Pertanian kepada Media di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 30 April 2025
Sumber: Biro Pers, Media dan Informasi (BPMI) Setpres, 2025

Refocusing anggaran dilakukan dengan prinsip efisiensi dan dampak langsung. Anggaran yang sebelumnya terserap untuk kegiatan pendukung, seperti rapat koordinasi, perjalanan dinas, dan kegiatan seremonial, dialihkan ke sektor produksi: benih, pupuk, alat mesin pertanian, perluasan lahan, dan penguatan logistik pangan. Strategi ini menunjukkan strategi optimalisasi anggaran mengacu pada kinerja yang semakin matang. Beberapa hal positif yang tercapai dengan melalui *refocusing* anggaran tahun 2024, antara lain impor beras menurun tajam dan sejarah ekspor jagung dari defisit ke surplus di Provinsi Gorontalo. Kondisi ini menjadi cerminan bahwa dengan dukungan fiskal yang

terarah, Indonesia mampu bergerak dari negara pengimpor ke negara pengekspor komoditas pangan strategis.

Dalam hal pengendalian inflasi pangan dan cadangan strategis, juga dipengaruhi adanya reprioritasi anggaran dalam rangka peningkatan produksi. Tercapainya penguatan cadangan pangan pemerintah (CPP) dan pengendalian harga beras sehingga lebih terkendali dan tidak terlalu fluktuatif meski terjadi gejolak global.

Sebagaimana diketahui stok beras akhir tahun 2024 sejumlah 2,07 juta ton, yang terdiri atas 1,818 juta ton CBP dan 252 ribu ton merupakan stok komersial (Bapanas, 2024). Kinerja pada awal tahun 2025 menunjukkan hal yang sangat signifikan. Optimalisasi penanaman pada triwulan IV tahun 2024 dan awal tahun 2025 yang selanjutnya memasuki masa panen pada periode Januari–April 2025 memberikan dampak yang besar terhadap kondisi cadangan beras. Data stok cadangan beras di Bulog pada bulan Mei 2025 mencapai 4 juta ton, menandai rekor stok beras tertinggi Bulog dari tahun 1969 atau sejak Bulog berdiri (Bulog, 2025).

B. Upaya Strategis Efisiensi Anggaran

1. Prioritas pada Program Strategis Nasional

Dalam rangka menjaga keberlanjutan program Kementerian Pertanian untuk mencapai swasembada pangan, diperlukan pemikiran dan upaya konkret untuk melakukan inventarisasi kebutuhan utama yang diperlukan. Untuk itu diperlukan fokus pelaksanaan pada program/kegiatan yang langsung berdampak pada peningkatan produksi padi seperti

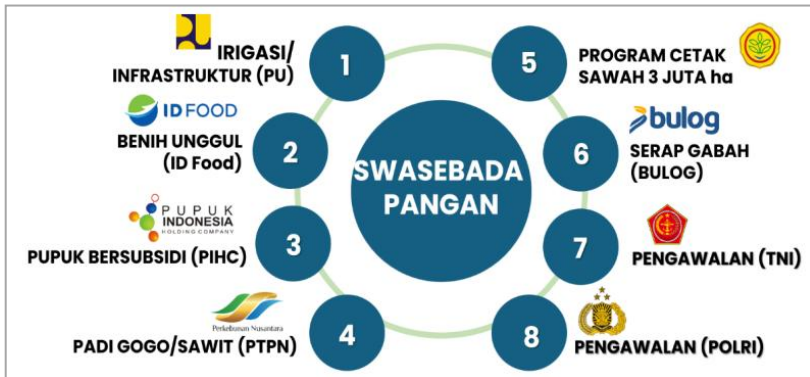
memastikan lahan dapat ditanami sesuai target indeks pertanaman (IP), pemenuhan sarana produksi, dukungan sumber daya manusia pertanian. Hal lain tentunya adalah memilah kembali anggaran operasional yang tidak langsung mendukung kegiatan mandatori terkait anggaran untuk perjalanan dinas, seremonial, atau kegiatan nonproduktif.

2. *Refocusing* dan Realokasi Anggaran

Dengan kondisi iklim yang tidak terprediksi dan kondisi pangan secara global.

3. Penguatan Kolaborasi Lintas Sektor

Upaya pencapaian swasembada pangan tidak dapat berjalan sendiri dan Kementerian Pertanian memerlukan kerjasama dan sinergi secara terus menerus dengan *stakeholder* terkait yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada upaya perwujudan swasembada pangan. Dukungan lintas kelembagaan pemerintah dan BUMN merupakan ruh pada implementasi program prioritas Kementerian Pertanian.



Gambar 13. Sinergi kelembagaan mendukung swasembada pangan

Sumber: Sekretariat Ditjen Tanaman Pangan, 2025

Sinergi dilaksanakan dalam hal dukungan sumber daya manusia yang secara intensif mengawal pelaksanaan kegiatan di lapang seperti kerja sama erat dengan TNI dalam percepatan produksi padi dan Polri dalam mengawal pencapaian produksi jagung. Dukungan penyediaan sarana produksi seperti pupuk, benih, penyediaan lahan padi gogo oleh BUMN serta pada sektor hilir dalam hal penyerapan hasil panen yang sangat krusial sebagai hilir produksi padi oleh BUMN Bulog.

Kebijakan pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan merupakan salah satu terobosan penting yang selanjutnya dilaksanakan melalui kolaborasi Kementerian Pertanian dan Kementerian PU. Sinergi perencanaan dan penganggaran

pada infrastruktur irigasi untuk sektor pertanian menjadi komponen penting untuk penyediaan air bagi petani.

Kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian bukan tanpa kendala, mengingat bahwa kebijakan ini menjadi budaya baru dalam pemerintahan yang akan menjadi acuan (*baseline*) penganggaran tahun-tahun berikutnya. Penerapan efisiensi yang utamanya menyasar belanja operasional rutin, seperti pengurangan alokasi alat tulis kantor, honorarium, koordinasi tatap muka dalam forum rapat/pertemuan, perjalanan dinas, tentunya harus mengubah budaya dan mendorong percepatan kerja yang harus diikuti dengan kemampuan sumber daya dalam menyesuaikannya, dalam hal ini pemanfaatan teknologi informasi.

Kendala teknis lainnya adalah program atau kegiatan prioritas pertanian yang sifatnya berkelanjutan sangat terpengaruh oleh lingkungan, sehingga respons berupa kebijakan cepat atau intervensi yang dilakukan ada yang belum terakomodir dalam aturan. Sebagai contoh adalah pengembangan gandum yang tidak menjadi komoditas prioritas pertanian pada RPJMN 2024–2029. Selain itu, adanya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih perlu untuk diselaraskan, disederhanakan, dan dievaluasi secara berkala untuk mencapai kepastian hukum, meningkatkan efisiensi birokrasi, dan menghindari kerumitan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggela, N. L.. (2025, April 21). *BPS: Impor Beras RI Turun 92% pada Januari-Maret 2025*. (<https://ekonomi.bisnis.com/read/20250421/12/1870600/bps-impor-beras-ri-turun-92-pada-januari-maret-2025>). Diakses tanggal 21 Mei 2025.
- Anggela, N. L. (2025, April 27). *Laporan USDA: Impor Beras RI Diproyeksi Turun 3,9 Juta Ton di 2025*. (https://ekonomi.bisnis.com/read/20250427/12/1872364/laporan-usda-impor-beras-ri-diproyeksi-turun-39-juta-ton-di-2025?utm_source=chatgpt.com). Diakses tanggal 21 Mei 2025.
- Ayuningrum, R.. (2025, Maret 24). *Kementan Beberkan Jenis Beras yang Bakal Diimpor Tahun Ini*. (<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7839544/kementan-beberkan-jenis-beras-yang-bakal-diimpor-tahun-ini>). Diakses tanggal 22 Mei 2025.
- Badan Pangan Nasional. (2024, Desember 24). *Kolaborasi Menjaga Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan di Akhir Tahun 2024*. (<https://badanpangan.go.id/blog/post/kolaborasi-menjaga-stabilitas-pasokan-dan-harga-pangan-di-akhir-tahun-2024>). Diakses 25 Mei 2025.
- Badan Pusat Statistik . (2025). *Berita Resmi Statistik Edisi Januari 2025*. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Berita Resmi Statistik Edisi Februari 2025*. Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Badan Pusat Statistik. (2025). Berita Resmi Statistik Edisi Maret 2025. Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Badan Pusat Statistik. (2025). Berita Resmi Statistik Edisi Mei 2025. Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Badan Pusat Statistik. (2025). Berita Resmi Statistik Edisi Juni 2025. Badan Pusat Statistik, Jakarta.

BSIP Serealia. (2024, Mei 29). *Lepas Ekspor Jagung Gorontalo ke Filipina, Mentan Minta Harga Jagung Dijaga Baik-Baik.* (<https://serealia.bsip.pertanian.go.id/berita/lepas-ekspor-jagung-gorontalo-ke-filipina-mentan-minta-harga-jagung-dijaga-baik-baik>). Diakses tanggal 22 Mei 2025.

BSIP Serealia. (2025, Februari 10). *Mentan Amran Pastikan Efisiensi Anggaran Tidak Menghambat Swasembada Pangan.* (<https://serealia.bsip.pertanian.go.id/berita/mentan-amran-pastikan-efisiensi-anggaran-tidak-menghambat-swasembada-pangan>). Diakses tanggal 25 Mei 2025.

BSIP. (2025, Maret 7). *Produksi Beras Kuartal I/2025 Tertinggi dalam Tujuh Tahun Terakhir.* (https://serealia.bsip.pertanian.go.id/berita/produksi-beras-kuartal-i2025-tertinggi-dalam-tujuh-tahun-terakhir?utm_source=chatgpt.com). Diakses tanggal 21 Mei 2025.

Badan Urusan Logistik. (2025, Juni 3). (<https://www.bulog.co.id/2025/06/03/stok-beras-tembus-4-juta-ton-tertinggi-sejak-bulog-berdiri>). Diakses tanggal 10 Juni 2025.

- Food and Agriculture Organization (FAO). (2025). *FAO Rice Price Update*. (<https://www.fao.org/markets-and-trade/commodities/rice/fao-rice-price-update/en>). Diakses tanggal 26 Mei 2025.
- FSIN and Global Network Against Food Crises. (2024). *Global report on Food Crises*. FSIN. Rome.
- Handoyo, E.. (2010). Konversi Lahan Pertanian ke Non Pertanian: Fungsi Ekologis yang Terabaikan. *Jurnal Forum Ilmu Sosial*, Vol. 37(2):118-126.
- Isma. (2025, Mei 15). *Cadangan Beras Melebihi 3,7 Juta Ton, Indonesia Menuju Kemandirian Pangan*. (<https://indonesia.go.id/kategori/ekonomi-bisnis/9356/cadangan-beras-melebihi-3-7-juta-ton-indonesia-menuju-kemandirian-pangan>). Diakses tanggal 26 Mei 2025.
- Kementerian Pertanian. (2024). *Laporan Kinerja Kementerian Pertanian TA 2024*. Kementerian Pertanian, Jakarta.
- Muslimawati. (2025, Mei 7). *Impor Beras-Gula Pasir Anjlok, Bea Masuk Kuartal I 2025 Turun 5,8*. (<https://kumparan.com/kumparanbisnis/impor-beras-gula-pasir-anjlok-bea-masuk-kuartal-i-2025-turun-5-8-persen-251VOW9UuZ7/2>). Diakses tanggal 22 Mei 2025
- UNICEF/WHO/World Bank Group. (2023). *Levels and Trends in Child Malnutrition. Key findings of the 2023*.
- Ventura, L. (2024, Mei 8). *Inflation Rate 2024: A Global Comparison*. (<https://gfmag.com/data/economic->

data/worlds-highest-lowest-inflation-rates). Diakses tanggal 26 Mei 2025.

World Bank. (2024, Oktober 29). *Oversupply Could Mute Effects of Wider Middle-East Conflict on Oil Prices*. (<https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2024/10/29/commodity-markets-outlook-october-2024-press-release>). Diakses tanggal 26 Mei 2025.

BIOGRAFI PENULIS



Andi Amran Sulaiman adalah sosok yang dikenal luas sebagai figur inspiratif dalam dunia pertanian Indonesia. Amran lahir di Bone, Sulawesi Selatan, pada 27 April 1968. Ayahnya, Andi B. Sulaiman Dahlan Petta Linta, adalah seorang veteran pejuang kemerdekaan, sementara ibunya, Andi Nurhadi Petta Bau, merupakan sosok ibu

tangguh yang membesarkan dua belas anak. Kecintaannya pada dunia pertanian membawanya menempuh studi lebih lanjut hingga akhirnya menjadi dosen di Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin, Makassar.

Setelah menyelesaikan studi dasarnya, Amran belajar ilmu pertanian di Universitas Hasanuddin Makassar. Beliau memperoleh gelar sarjana pada 1993, magister pada 2003, dan doktor pada 2012. Beliau lulus dengan IPK maksimal, dan mematenkan berbagai penemuan yang mencakup pengendalian hama. Saat ini ia memegang 5 hak paten dan tercatat sebagai dosen di universitas almamaternya. Ia menerima penghargaan sipil Satyalancana Pembangunan

dari Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2007. Nama lengkap dengan gelar akademis yang telah diraih yaitu Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P.

Perjalanan hidup Amran mencerminkan kerja keras dan komitmen pada kemajuan bangsa. Selain sebagai akademisi, beliau juga dikenal sebagai pengusaha yang sukses. Keahliannya di bidang pertanian dan kepeduliannya terhadap nasib petani Indonesia menjadikannya sosok yang layak dipercaya untuk memimpin Kementerian Pertanian. Amran pertama kali diangkat sebagai Menteri Pertanian pada tahun 2014 dan menjabat hingga 2019.

Pada 25 Oktober 2023, beliau kembali dipercaya untuk mengemban tugas yang sama. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Amran kembali masuk dalam Kabinet Merah Putih, menjadikan dirinya sebagai salah satu menteri pertanian yang menjabat selama tiga periode.

I Ketut Kariyasa menjabat sebagai Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan sejak 9 Juli 2025. Ketut lahir di Tabanan, Bali pada tanggal 19 April 1969. Beliau menempuh pendidikan S1 di bidang Sosial Ekonomi Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) dan S2 Ekonomi Pertanian di universitas yang sama.

Gelar doktoral diperolehnya dari University of the Philippines Los Baños pada tahun 2011. Selain berkiprah pada jenjang struktural, Ketut juga merupakan Peneliti Ahli Utama sejak tahun 2014, menunjukkan komitmennya terhadap riset dan pengembangan kebijakan berbasis data

ilmiah. Nama lengkap dengan gelar akademis yang diperoleh yaitu Dr. Ir. I Ketut Kariyasa, M.Si.

Galih Prabowo merupakan ASN yang bertugas di Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Ia menyelesaikan pendidikan magister di bidang Administrasi Publik pada Universitas Dr. Moestopo (Beragama). Sebagai aparatur di lingkungan Kementerian Pertanian, Galih Prabowo berperan dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan program strategis kementerian. Nama lengkap dengan gelar akademis yang diperoleh yaitu Galih Prabowo, S.E., M.A.P.

Ahmad Muhtarom adalah ASN di Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Beliau menempuh pendidikan S1 di Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), dan melanjutkan ke jenjang S2 pada program Magister Agribisnis di universitas yang sama.

Ahmad Muhtarom juga aktif menulis karya ilmiah, salah satunya berjudul “Farmers Empowerment on Food Security Program in Enggal Maju Farmers Group Association of Kebumen Regency” yang diterbitkan dalam Jurnal Agrisocionomic. Nama lengkap dengan gelar akademis yang diperoleh yaitu Ahmad Muhtarom, S.P., M.P.

Zia Ulhaq merupakan ASN yang bekerja di Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Ia menempuh pendidikan tinggi pada program studi S1

Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram.

Dalam menjalankan tugasnya, Zia Ulhaq berperan dalam mendukung proses perencanaan dan pengelolaan anggaran di lingkungan Kementerian Pertanian. Nama lengkap dengan gelar akademis yang diperoleh yaitu Zia Ulhaq.